

2021

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Nomor Induk Mahasiswa : 1056111108817

NUR AFNI RUSLAN



KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL TUNAI BAGI
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI MASA PANDEMI
COVID-19 DI KELURAHAN KALUKU BODOA
KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR

SKRIPSI

SKRIPSI

KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL TUNAI BAGI

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI MASA PANDEMI

COVID-19 DI KELURAHAN KALUKU BODOA

KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Disusun dan Diajukan Oleh

NUR AENI KUSLAN

Nomor Stambuk: 10561 1108 817

07/09/2021
1 exp
smb. Alumni
Kepada
P/0142/AN/21 CO
KUP
K

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN

Judul Proposal Penelitian : Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar

Nama Mahasiswa

Nur Azzah Ruslan

Nomor Induk Mahasiswa

: 1056111108817

Program Studi

: Ilmu Administrasi Negara

Pembimbing I

Mengajar

Pembimbing II

Dr. Muhammad Tahir, M.Si

Dr. Jaelan Usman, M.Si

Mengetahui

Ketua Program Studi

Dekan

Dr. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
NBMM: 730727

Nasrul Haq, S.Sos, MPA
NBMM: 1067463







HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0204/FSP/A.4-II/VIII/42/2020 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada 31 Agustus 2021



1. Dr. H. Lukman Hakim, M.Si
2. Dr. Muhammaad Tahir, M.Si
3. Dr. Amir Muhiddin, M.Si

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nur Afni Ruslan

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 1110 8817

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar Skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 31 Agustus 2021

Yang Menyatakan,

Nur Afni Ruslan



ABSTRAK

Nur Afni Ruslan, Jaelan Usman dan Muhammad Tahir. Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar.

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis Kebijakan Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar, untuk mengetahui bagaimana Evaluasi kebijakannya. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian adalah Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar. Jenis data yang digunakan adalah primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan bantuan sosial tunai menggunakan teori evaluasi kebijakan, dengan hasil penelitian: Efektivitas: Kebijakan BST di Kelurahan Kaluku Bodoa belum efektif, meskipun pencapaian tujuannya dapat diadakannya tindakantindakannya, dalam pemilihan penerima tidak valid karena ditemukan masih adanya masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan tersebut tetapi tidak terdaftar sebagai penerima. Kedua Kecukupan: Kebijakan program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Kaluku Bodoa dalam mengatasi perekonomian masyarakat sudah dapat meringankan beban di masa pandemi covid-19, namun belum menyelesaikan persoalan kesejahteraannya. Pemerataan: berhubung dengan biaya dan manfaat BST yang didistribusikan kepada masyarakat di Kelurahan Kaluku Bodoa sudah merata. Adapun besaran biaya dan manfaatnya yang telah disalurkan itu sudah merata untuk semua masyarakat di Kelurahan Kaluku Bodoa, masyarakat cuma perlu memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Responsivitas: Respon dari masyarakat yang ada di Kelurahan Kaluku Bodoa sudah sangat baik, dengan adanya respon yang baik dan rasa syukur dari masyarakat penerima, program BST ini sudah dikatakan berhasil. Ketepatan: Dalam hal ketepatan bantuannya sudah tepat, karena dengan bantuan tersebut sudah membantu meringankan beban kebutuhan pokok di masa pandemi Covid-19 bagi masyarakat di Kelurahan Kaluku Bodoa.

Kata Kunci : Evaluasi kebijakan, Bantuan Sosial, Masyarakat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga atas kehadiran Allah

SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi yang berjudul "Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Bagi

Kesejahteraan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Kaluku

Bodo Kecamatan Tallo Kota Makassar"

Tersumewa dan terima penulis sampaikan ucapan kasih untuk

kedua orang tua Bapak Alm. Ruslan dan Ibu Hj. Hasnawati yang senantiasa

memberi dukungan, perhatian, kasih sayang, dan doa tulus tanpa pamrih. Penulis

menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan

dan dorongan dari berbagai pihak oleh karena itu pada kesempatan ini penulis

menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Jaelan Usman, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Dr.

Muhammad Tahir, M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan

waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat di

selesaikan.

2. Ibu Dr. Hj Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Nasrul Haq, S.Sos., MPA selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Segenap keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materi
 5. Serta teman-teman kelas seperjuangan Ilmu Administrasi Negara terima kasih atas segala bantuan, cerita, kenangan, semangat dan kenangannya selama ini.
- Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan

Makassar, 31 Agustus 2021

Nur Aini Ruslan



DAFTAR ISI

1	HALAMAN PERSETUJUAN
II	HALAMAN PENERIMAAN TIM
III	HALAMAN PERNYATAAN
IV	ABSTRAK
V	KATA PENGANTAR
VII	DAFTAR ISI
IX	DAFTAR TABEL
I	BAB I. PENDAHULUAN
1	A. Latar Belakang
5	B. Rumusan Masalah
5	C. Tujuan Penelitian
5	D. Manfaat Penelitian
7	BAB II. TINJAUAN PUSTAKA
7	A. Penelitian Terdahulu
8	B. Teori dan Konsep Evaluasi Kebijakan Publik
14	C. Teori dan Konsep Bantuan Sosial Tunai
19	D. Teori dan Konsep Kesejahteraan
27	E. Kerangka Pikir
27	F. Fokus Penelitian
28	G. Definisi Fokus

30	BAB III. METODE PENELITIAN
30	A. Waktu dan Lokasi Penelitian
30	B. Jenis dan Tipe Penelitian
31	C. Sumber Data
31	D. Informan
32	E. Teknik Pengumpulan Data
33	G. Teknik Analisis Data
33	F. Teknik Pengabsahan Data
35	BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
35	A. Deskripsi Lokasi Penelitian
41	B. Hasil Penelitian
61	C. Pembahasan Penelitian
70	BAB V. PENUTUP
70	A. Kesimpulan
71	B. Saran
72	DAFTAR PUSTAKA
74	LAMPIRAN



68	Tabel. 4. 3 Hasil Penelitian
41	Tabel. 4.2 Perbandingan Jumlah Penduduk Dengan Penerima BST
40	Tabel. 4.1 Jumlah Penduduk Keluarahan Kaluku Bodoa
32	Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian

DAFTAR TABEL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan global yang terjadi di beberapa bulan terakhir yaitu pandemi

virus Covid-19 yang sudah melanda hampir di seluruh dunia termasuk di negara

Indonesia. Virus Covid-19 ini terdeteksi untuk masuk pertama kali ke Indonesia

pada tanggal 2 Maret 2020 dengan jumlah penderita positif sebanyak 2 orang.

Sekarang wabah virus corona yang sekarang sudah menjadi pandemi ini sudah

menyebarkan masif di Indonesia kasus positif dengan jumlah sebanyak 24.538 orang

dan sudah mengenai korban jiwa berjumlah 1.496 jiwa sedangkan yang sembuh

6.240 orang (sumber data Gugus Tugas percepatan penanganan Corona tanggal 28

Mei 2020).

Kemiskinan yaitu masalah yang sangat serius yang masih dihadapi oleh

beberapa negara di dunia contohnya di Negara Indonesia apalagi di masa pandemi

sekarang. Banyak masyarakat yang pekerjaannya hilang dikarenakan PHK apalagi

di situasi seperti ini. Oleh karena itu, maka pemerintah membuat kebijakan

ataupun program untuk menanggulangi masalah tersebut. Pemerintah

mengeluarkan berbagai macam bantuan guna membantu masyarakat dalam masa

pandemi Covid-19. Adapun daftar bantuan yang dikeluarkan pemerintah di masa

pandemi yaitu Bantuan Sembako, Bantuan Sosial Tunai, BLT Dana Desa, Listrik

Gratis, Kartu Prakerja, Subsidi Gaji karyawan, BLT usaha mikro kecil. Peneliti

mengambil salah satu Program Kebijakan yaitu Bantuan Sosial Tunai selanjutnya

diangkat BST, karena menarik perhatian peneliti untuk meneliti bagaimana

implementasi dari program tersebut dan bagaimana Evaluasi Kebijakan yang terjadi di masyarakat.

Kementerian Sosial sendiri sudah mengeluarkan kebijakan berupa program-program bantuan sosial yang dibagikan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak ekonomi dari pandemi corona ini. Terbitnya peraturan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), semakin memperjelas bahwa untuk mewujudkan masyarakat miskin yang sejahtera kebijakan tersebut harus betul-betul mampu mengatasi kemiskinan walaupun tidak banyak masyarakat miskin yang menerima Bantuan Sosial Tunai atau bansos Tunai adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, atau yang terkena dampak dari wabah Covid-19.

Meskipun Program Bantuan Sosial Tunai tidak secara langsung berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat miskin, tetapi program kebijakan ini memberikan manfaat bagi mereka. Bantuan Sosial Tunai memiliki manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan hidup masyarakat miskin terutama dalam memenuhi kebutuhannya apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Bantuan Sosial Tunai ini diberikan kepada masyarakat miskin agar masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat penerima adalah yang tingkat kesehatannya rendah.

Pada masa pandemi sekarang ini, sebagian besar masyarakat miskin yang mengharapkan kepada pemerintah agar efektif dalam melaksanakan kebijakan

program tersebut termasuk masyarakat di Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar. Masyarakat berharap banyak kepada pemerintah agar dapat membantu kebutuhan hariannya walaupun tidak sepenuhnya terpenuhi. Program BST dari Kemensos sebesar Rp. 600 Ribu diberikan untuk meringankan beban masyarakat saat pandemi Covid-19. Bantuan sosial merupakan jaring pengaman sosial untuk masyarakat kurang mampu yang paling beresek secara sosial ekonomi karena wabah virus.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa tugas dari pemerintah Negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, istilah "kesejahteraan umum" yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 mempunyai arti yang sama dengan istilah "kesejahteraan sosial" yang tercantum dalam Bab XIV UUD 1945 (Fahrudin, 2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa kesejahteraan sosial yaitu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, maupun sosial warga negara supaya bisa hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga diri dapat melakukan fungsi sosialnya.

Pengertian dari kesejahteraan yang dimaksud dalam Undang-undang 1945, baik dalam bagian pembukaan dan Bab XIV maupun dalam Undang-undang No. 11/2009 mempunyai pedanan secara internasional dengan konsep kesejahteraan. Menurut Jones, (1990), yaitu "the achievement of social welfare means, first and foremost, the alleviation of poverty in its manifestations". *Social welfare* yang dimaksud dapat diartikan sebagai kesejahteraan, kesejahteraan umum ataupun

kesejahteraan sosial. Ismail, (2015) mengatakan bahwa kesejahteraan yaitu konsep yang tidak terlihat karena keberadaannya terkait langsung dengan nilai-nilai hidup dan ideologi yang dimiliki oleh seseorang. Kesejahteraan tidak hanya diartikan sebagai ukuran ketersediaan material, akan tetapi perlu diartikan dengan pandangan hidup bangsa yang dianut. Kesejahteraan tidak hanya menjadi cita-cita perindividu secara perorangan, akan tetapi menjadi tujuan sekumpulan individu yang digabungkan dalam suatu negara, sehingga kesejahteraan terbagi menjadi dua, yaitu kesejahteraan individu dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan individu adalah kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh setiap orang sebagai individu, sementara itu kesejahteraan masyarakat yaitu kesejahteraan yang dirasakan semua orang dalam satu kesatuan. Kesejahteraan masyarakat seperti di Kelurahan Kalauku Bodoa masih membutuhkan perhatian dari pemerintah. Masih banyak masyarakat miskin yang mengharapkan Program Bantuan Sosial Tunai dapat meningkatkan individu maupun kelompok. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan penulis, masyarakat yang menerima Program Bansos Tunai di Kelurahan Kalauku Bodoa—seperti yang dikemukakan oleh salah satu pegawai di kantor kelurahan tersebut sekitar 300 KK. Pada tahun 2019 bansos tunai telah tersebar di Kelurahan Kalauku Bodoa dikarenakan masih adanya masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhannya.

Untuk mengukur program kebijakan BST bagi kesejahteraan masyarakat memakai indikator Evaluasi Kebijakan Publik menurutDunn, (2013): Efektivitas.

Kecukupan, Pemerataan/kesamaan, Responsibilitas, Ketepatan agar mengetahui sejauh mana program kebijakan tersebut sudah terlaksana dengan efektif.

Berdasarkan latar belakang yang ada di atas, maka peneliti tertarik untuk mencoba melakukan penelitian tersebut dengan judul : "Evaluasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar"

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan penguasaan atas pokok masalah yang akan diteliti dalam bentuk pertanyaan berdasarkan pada narasi latar belakang masalah, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan dalam penulisan proposal ini yaitu: Bagaimana Kebijakan dari Program Bantuan Sosial Tunai bagi kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana Kebijakan dari Program Bantuan Sosial Tunai bagi kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, adalah:

1. Manfaat teoritis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangsan pikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Administrasi Negara

b. Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berpikir penulis

melalui karya ilmiah serta melatih penulis menerapkan teori-teori yang

penulis dapat selama perkuliahan.

2. Manfaat praktis

a. Penelitian ini memberikan masukan (input) dan sebagai perbaikan dalam

meningkatkan kebajikan bantuan sosial tunai untuk kesejahteraan

masyarakat

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dan masukan

kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian dan bahan referensi

bagi penulis yang ingin melanjutkan penelitian yang sama.



Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dalam mendukung

A. Penelitian Terdahulu

TINJAUAN PUSTAKA

BAB II

penelitian ini, diantaranya:

1. Menurut Khoiriyah (2020) yang melakukan penelitian pada Kantor Desa Gendongarum Kecamatan Kantor Kabupaten Bojonegoro, menunjukkan bahwa pelaksanaan Bantuan Sosial dari Pemerintah Terhadap Masyarakat terdampak Covid-19 ini masih dirasa kurang efektif dalam hal kurangnya keakuratan data dan tidak tepat sasaran sebab tidak ada pembahasan data. Oleh karena itu, perlunya suatu inisiatif tersendiri dari perangkat desa agar program bantuan sosial BST ataupun BLT-Dana Desa ini bisa lebih baik kedepannya. Maka perlu suatu adanya keaktifan pelaksanaan bantuan dalam suatu program yang mana bisa dinilai dengan seberapa jauh peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan diberlakukan program bantuan tersebut.

2. Menurut Carly (2020) yang melakukan penelitian pada Desa Talaiad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan, menunjukkan bahwa pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai dapat disimpulkan sudah tepat waktu dan mengikuti mekanisme yang ada. Untuk ketepatan sasaran, dapat disimpulkan bahwa pemberian Bantuan Langsung Tunai di Desa Talaiad Kecamatan Suluun Tareran sudah tepat sasaran. Hal tersebut didasari oleh pernyataan masyarakat yang merasakan langsung dampak BLT dan merupakan pelaku langsung di lapangan.

3. Menurut Pramantik (2020) yang melakukan penelitian di Padalarang,

menunjukkan bahwa pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai sangat berpengaruh bagi hidup masyarakat Padalarang, maka sudah seharusnya pemerintah Kota Padalarang dalam hal ini meningkatkan Bantuan Sosial Tunai ini secara tepat telah mengingat kelangsungan hidup para warga Padalarang karena Pandemi Covid 19, akibat tidak menghasilkan uang untuk membiayai hidup mereka.

B. Teori dan Konsep Evaluasi Dampak Kebijakan Publik

Kebijakan publik yaitu keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tatanan strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka dari itu kebijakan publik harusnya dibuat oleh otoritas politik, mereka yaitu yang mendapatkan amanat dari publik atau banyak orang, pada umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilakukan oleh administrasi negara yang di jalankan oleh birokrasi pemerintahan. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan salah satu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau memperbaiki kualitas kehidupan orang banyak. Keseimbangan peran negara yang memiliki kewajiban menyediakan pelayanan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi dan pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan beberapa kepentingan dan mencapai amanat konstitusi.

Terminologi kebijakan publik berpacuk kepada serangkaian peralatan pelaksanaan yang sangat luas dari peraturan perundang-undangan, mencakup juga

aspek anggaran dan struktur pelaksanaan. Siklus kebijakan publik sendiri bisa dihubungkan dengan pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Bagaimana keterlibatan publik dalam setiap tahapan kebijakan bisa menjadi patokan tentang tingkat kepatuhan negara kepada amanat rakyat yang berdaulat atasnya. Bisakah publik mengetahui apa yang menjadi agenda kebijakan, yaitu serangkaian persoalan yang akan diselesaikan dan prioritasnya, dapatkah publik memberikan masukan yang berpengaruh bagi isi kebijakan publik yang akan dilahirkan. Begitu juga pada tahap pelaksanaan, dapatkah publik mengawasi penyimpanan pelaksanaan, juga apakah mekanisme kontrol publik tersedia, yakni proses yang memungkinkan keberatan publik atas suatu kebijakan dibicarakan dan berpengaruh secara jelas. Kebijakan publik mengarah pada keinginan penguasa atau pemerintah yang normalnya dalam masyarakat demokratis merupakan cerminan pendapat umum (opini publik). Untuk mewujudkan keinginan tersebut dan menjadikan kebijakan tersebut efektif, maka diperlukan beberapa hal: pertama, tersedianya perangkat hukum yaitu peraturan perundang-undangan agar dapat diketahui publik apa yang sudah diputuskan; kedua, kebijakan ini harus betul terstruktur pelaksanaannya dan pembiayaannya; ketiga, diperlukan adanya kontrol publik, yakni mekanisme yang memungkinkan publik mengetahui apakah kebijakan ini pada pelaksanaannya mengalami penyimpangan atau malah sebaliknya. Dalam masyarakat autoriter kebijakan publik yaitu semata hanya keinginan penguasa, sehingga penjelasan di atas tidak terlaksana.

Lindblom (1986, dalam Winarno 2007: 32) mengemukakan bahwa proses

pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji oleh aktor pembuat kebijakan.

Keahlian para pemimpin politik untuk berkomunikasi dengan masyarakat untuk mengumpulkan keinginan mereka adalah hal yang penting, tetapi sama hal

pentingnya adalah keahlian para pemimpin untuk menjelaskan kepada masyarakat kenapa suatu keinginan bisa tidak dipenuhi, yaitu tidak untuk mengharapakan

bahwa pemerintah bisa selalumemaskan seluruh masyarakat selalu, tetapi

ada otoriter suatu pemerintahan yang tidak memperhatikan dengan benar-benar

aspirasi dan berusaha mengkomunikasikan kebijakan yang berjalan maupun yang

akan dilaksanakannya. Dalam pendekatan yang lainnya kebijakan publik dapat

dimaknai dengan cara memilih dua konsep yang besarnya yaitu kebijakan dan publik.

Terminologi kebijakan bisa diartikan sebagai pilihan tindakan diantara sejumlah

alternatif yang tersedia. Artinya kebijakan merupakan hasil musyawarah untuk

selanjutnya memilih yang terbaik dari pilihan-pilihan yang tersedia. Dalam

konsep makro hal ini selanjutnya diangkat dalam porsi pengambilan keputusan.

Charles Lindblom adalah akademisi yang menyatakan bahwa kebijakan berkaitan

erat dengan pengambilan keputusan. Karena pada umumnya sama-sama memilih

diantara opsi yang tersedia.

Pada pelaksanaan kebijakan publik ini harus diturunkan dalam

serangkaian petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang

berlaku internal dalam birokrasi. Sedangkan dilihat dari sisi masyarakat, yang

utamanya adalah adanya suatu standar pelayanan publik, yang menjelaskan kepada

Hasil evaluasi akan dianalisa seperti pertimbangan untuk pembuat kebijakan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian demi kesempurnaan kebijakan itu sendiri. Hal ini mengarah kepada suatu kebijakan publik tidak harus selamanyaakan tetapi membutuhkan penyesuaian, karena kebijakan sangat

f. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

tersebut atau karena penyebab lain.

e. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan

d. Pengukuran pada tingkatan perubahan yang terjadi.

c. Standarisasi kegiatan dan Deskripsi.

b. Masalah yang akan dianalisis.

a. Evaluasi tujuan program yang akan diidentifikasi.

dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

yaitu satu sisi lain lebih ke sisi praktis dengan mengemukakan enam langkah

Dalam bukunya Winarno, (2008), mengutip pernyataan Edward A. Sueman

upaya menganalisis kebijakan publik tertentu sebagai variabel terikat

menjadikan budaya politik atau kekuatan politik sebagai variabel bebas dalam

laksanakan. Dengan mengambil fokus ini tidak menutup kemungkinan untuk

pengambilan keputusan hingga evaluasi dan pengawasan termasuk yang di

politik pada administrasi negara, karena pada analisisnya adalah proses

layanan. Politik memfokuskan pada kebijakan publik yang mendekatkan kajian

pemerintah (negara) sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima

persyaratannya, dan bagaimana bentuk layanan tersebut. Maka akan mengikat

masyarakat bahwa pelayanan adalah haknya, siapa yang bisa mendapatkannya, apa

dipengaruhi oleh faktor social, politik, ekonomi, teknologi, budaya, dan informasi yang senantiasa dinamis.

Dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan tolak ukur umum yang dimaksudkan untuk member arahan bagi evaluator. Tolak ukur yang didefinisikan akan dapat dijadikan seperti salah satu patokan dalam menentukan apakah suatu kebijakan sukses atau tidak.

Menurut Dunn (2013) dalam jumlahya (Dewi, 2011) menjelaskan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan yang meliputi 6 (enam) bentuk sebagai berikut:

- 1) Efektifitas (*Effectiveness*)
Berhubungan dengan apakah suatu substitusi mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas yang secara dekat berkenaan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari bagian produk atau layanan atau nilai moneternya.
- 2) Efisiensi (*Efficiency*)
Berhubungan dengan jumlah usaha sangat diperlukan untuk meningkatkan tingkat efektifitas khusus. Efisiensi yang menjadi sinonim dengan rasionalitas ekonomi, yaitu menggambarkan hubungan antara efektifitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari upah moneter.
- 3) Kecukupan (*Adequacy*)

Berhubungan dengan seberapa maksimal suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, kesempatan atau nilai yang menimbulkan adanya masalah. Tolak

ukurkecukupan menekankan pada efektivitasnya hubungan antara alternatif kebijakan

dan hasil yang diharapkan.

4) Pemerataan/Kesamaan (*Equity*)

Indeks ini erat berkaitan dengan rasionalitas legal dan sosial dan mengarah

pada distribusi akibat dan usaha di sela-sela kelompok-kelompok yang berbeda

dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan

yang berdampak (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha

(misalnya biaya moneter) secara adil disalurkan. Kebijakan yang dibuat untuk

mensalurkan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan publik sewaktu-

waktu direkomendasikan atas dasar tolak ukur kesamaan. Tolak ukur kesamaan

sangat berkaitan dengan konsepsi yang saling berlawanan, yaitu keadilan atau

kebiasaan dan terhadap konflik etnis, sekitar dasar yang mencoba untuk

mendistribusikan sumber daya dalam masyarakat.

5) Responsivitas (*Responsiveness*)

Berhubungan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan

preferensi, kebutuhan, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Tolak

ukur responsivitas yaitu penting karena analisis yang dapat memuaskan semua

tolak ukur lainnya – efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan – masih gagal

apabila belum menangkap kebutuhan nyata dari kelompok yang seharusnya

diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

6) Ketepatan (*Appropriateness*)

Ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive,

karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berhubungan dengan satuan

kriteria individu tetapi dua atau lebih criteria secara bersamaan. Ketepatan mengarah pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya anggapannya yang melandasi tujuan tersebut.

Untuk mengukur program kebijakan BST bagi kesejahteraan masyarakat penulis hanya mengambil lima indikator Evaluasi Kebijakan Publik menurut (Dunn, 2013): Efektivitas, Kecukupan, Pemerataan/kesamaan, Responsibilitas, Ketepatan agar mengetahui sejauh mana program kebijakan tersebut sudah terlaksana dengan efektif.

C. Teori dan Konsep Bantuan Sosial Tunai

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenduk PMA) berpedoman dengan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2015, tentang Kemenduk PMA bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pemerintahan manusia dan kebudayaan, kebijakan ini salah satunya menjangkau program kesejahteraan rakyat melalui pemberian bantuan sosial tunai pada masyarakat. Bantuan ini diberikan untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan derajat hidup penerima bansos.

Kementerian Sosial sendiri telah mengelaborasi kebijakan berbentuk program-program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang ekonominya berdampak karena pandemi corona ini. Munculnya peraturan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), menetapkan bahwasanya untuk mewujudkan masyarakat miskin yang sejahtera kebijakan

tersebut harus betul-betul mampu menangani kemiskinan walaupun sedikitnya masyarakat miskin yang menerima. Bantuan Sosial Tunai atau bansos Tunai adalah bantuan yang berbentuk uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak dari wabah Covid-19.

Fungsi ini juga searah dengan amanat dalam Inpres Nomor 7 tahun 2014 tentang pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintas, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga Produktif.

Pemerintah makin siap dalam membantu meringankan beban masyarakat, terkhusus bagi mereka yang terdampak virus corona (Covid-19). Konsepnya, pemerintah akan memberikan beberapa macam bantuan sosial berupa bantuan paket sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan dibagikan kepada masyarakat menurut pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sementara itu, Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang berasal dari alokasi dana desa pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang mata pencahariannya hilang dikarenakan pandemik virus corona atau Covid-19, adapun juga bagi masyarakat yang tidak menerima dana Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja. Masyarakat calon penerima BST maupun BLT setiap kepala keluarga akan menerima bantuan uang tunai sebesar Rp 600.000,00 setiap bulannya selama tiga bulan. Tujuan dari rencana pemberian program bantuan ini yaitu untuk menjaga daya beli masyarakat di masa

pandemik virus corona. Kemudian, semua bantuan tersebut akan dibagikan ke seluruh wilayah Indonesia, dan menyebar kepada warga terdampak secara langsung maupun tak langsung.

Pemerintah menetapkan beberapa syarat untuk masyarakat yang ingin

mendapatkan BST tersebut. Adapun sebagai berikut:

1. Calon penerima yaitu masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan bertempat tinggal di Desa.
2. Calon penerima yaitu mereka yang kehilangan pekerjaannya di masa pandemi corona.
3. Calon penerima juga tidak terdaftar sebagai penerima BST lainnya dari pemerintah pusat. Yang artinya calon penerima BST tidak mendapat Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sampai Kartu Prakerja.
4. Apabila calon penerima tidak menerima bansos dari program lain, namun belum terdaftar di RT/RW, maka dapat langsung menghadap ke aparat desa.
5. Apabila calon penerima sudah memenuhi syarat, akan tetapi tidak mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta Kartu Penduduk (KTP), namun tetap bisa mendapatkan bantuan tanpa harus lebih dulu membuat KTP. Tapi, penerima bersyarat harus berdomisili di desa dan mencatat alamat lengkapnya.
6. Apabila penerima sudah terdaftar dan sah, maka BLT akan dibagikan melalui tunai dan tidak tunai. Non tunai dibagikan melalui transfer ke rekening bank

para penerima dan tunai bisamelapor ke aparat desa, bank milik negara atau bisa diambil langsung di kantor pos terdekat.

Warga yang terdampak covid-19 dan telah memenuhi syarat untuk menerima BST, berikut cara mengambilnya:

- a. Pastikan anda tidak terdaftar di program bansos dari pemerintah yang lainnya. Cek apakah nama Anda telah terdaftar ke penerima bansos tunai ke RT/RW sekitar.
- b. Jika belum, daftarkan diri dengan cara menyertakan fotokopi KTP ke kepala desa untuk data Anda yang akan diserahkan kepada pihak bank-bank milik negara yang berpartisipasi pada program.
- c. Selanjutnya tunggu informasi mengenai pencairan dana Anda ke rekening (jika memilih melalui transfer). BST akan dibagikan oleh Kementerian Sosial (Kemensos), Pos Indonesia, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan akan diberikan kepada warga negara Indonesia (WNI) yang telah terdaftar atau belum kepada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kemensos. Berikut rinciannya:

- 1) BST bakal di transfer langsung melalui rekening pribadi penerima atau ke PT Pos Indonesia.

- 2) Untuk yang memilih melalui sistem transfer rekening, berikut yaitu daftar rekeningnya: BTN, BRL, Mandiri, dan BNI.

- 3) Untuk yang tidak mempunyai rekening bank, maka uang BST dapat diambil melalui Kantor Pos. Untuk proses pencairan langsung ke penerima BST secara nontunai (transfer) tidak akan dikenai biaya dan bunga.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UD 1945) yang menggarahkan bahwa tugas dari pemerintah Negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Istilah "kesejahteraan umum" yang tercantum dalam pembukaan UD 1945 mempunyai arti yang sama dengan istilah "kesejahteraan sosial" yang tercantum dalam Bab XIV UD 1945 (Fahrudin, 2012). Undang-Undang

D. Teori dan Konsep Kesejahteraan

penerimaannya adalah yang tingkat kesejahteraannya rendah. masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat sekarang ini. Bantuan Sosial Tunai ini diberikan kepada masyarakat miskin agar miskin terutama dalam memenuhi kebutuhannya apalagi di masa pandemi seperti tunai memiliki manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan hidup masyarakat tetapi program kebijakan ini memberikan manfaat bagi mereka. Bantuan Sosial tidak secara langsung berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat miskin, kondisi setelah menerima bantuan BST, meskipun Program Bantuan Sosial Tunai mempertahankan karyawan di masa pandemi Covid-19. Begitu pula dengan banyaknya terkena PHK oleh perusahaan, karena perusahaan sudah tidak mampu masyarakat karena lapangan pekerjaan harian mereka menjadi hilang, selain mengakibatkan dampak yang cukup penting terhadap kelangsungan hidup Kondisi yang dialami masyarakat sebelum mendapatkan BST, hal ini nomor handphone.

Adapun Penerima BST adalah warga yang dianggap memadai menerima bantuan dan yang terkena dampak ekonomi langsung karena pandemi covid-19 dan telah dilengkapi dengan data semacam BNBA (*by name by address*), NIK dan

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga diri dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Definisi kesejahteraan yang dimaksud dalam UUD 1945, baik dalam bagian pembukaan dan Bab XIV maupun dalam UU No. 11/2009 memiliki pedanan secara internasional dengan konsep kesejahteraan, menurut Jones dalam skripsi Nirwasari (2020), yaitu *"the achievement of social welfare means, first and foremost, the alleviation of poverty in its manifestations"*. *Social welfare* yang dimaksud bisa diartikan sebagai kesejahteraan, kesejahteraan umum ataupun kesejahteraan sosial. Ismail, (2015) mengemukakan bahwa kesejahteraan yaitu konsep yang *transcendental* karena keberadaannya terkait langsung dengan nilai-nilai hidup dan ideologi yang diyakini oleh seseorang. Kesejahteraan tidak saja diartikan sebagai ukuran ketersediaan material, namun perlu diartikan dengan pandangan hidup bangsa yang dianut. Kesejahteraan bukan saja menjadi cita-cita individu secara perorangan, tetapi menjadi wujud sekumpulan individu yang bergabung dalam suatu negara sehingga muncul dua macam kesejahteraan, yaitu kesejahteraan individu dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan individu yaitu kesejahteraan yang dirasakan oleh setiap orang sebagai individu, kemudian kesejahteraan masyarakat yaitu kesejahteraan yang dirasakan semua orang dalam satu kesatuan.

Menurut asal kata, kesejahteraan berasal dari kata "sejahtera" yang menyimpang pengertian dari bahasa Sanskreta "*celera*" yang artinya "payung".

Dari kata ini dapat menunjukkan bahwa adapun yang dimaksud dengan kesejahteraan yang tercantum dalam "cetera" yaitu orang yang sejahtera, yaitu orang yang dalam hidupnya aman damai, baik lahir maupun batin Fahrudin, (2012). Menurut Friendlander dalam Skripsi Indarwati(1961)mengemukakan bahwa kesejahteraan yaitu sistem yang terorganisasi yang dilakukan dengan pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial dengan tujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang dapat memuaskan serta hubungan-hubungan pribadi dan sosial yang memberikan kesempatan kepada mereka agar mengembangkan semua kemampuannya dan untuk meningkatkan kesejahteraannya selimpal dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat itu sendiri.

Adi (2013) mengemukakan beberapa paradigma kesejahteraan sosial, salah satunya yaitu paradigma *developmental* atau model kesejahteraan *developmental*. Paradigma ini merupakan konsepsi tentang sistem kesejahteraan sosial yang berdasarkan pada nilai-nilai keadilan sosial (*social justice*) yang mengutamakan pada aspek kesetaraan, kerja sama, dan keinginan untuk saling berbagi dari anggota masyarakat. Selain itu, Adi menyebut bahwa bidang kesejahteraan sosial dapat dikhususkan berdasarkan besaran (*size*) kelompok yang dituju, yaitu (1) kesejahteraan individu, (3) kesejahteraan keluarga, (3) kesejahteraan kelompok, (4) pengembangan kesejahteraan masyarakat lokal, dan (5) pengembangan kesejahteraan publik secara luas. Pernyataan dari Mayo (1998), masyarakat bisa diartikan dalam 2 (dua) konsep, yaitu masyarakat sebagai suatu wilayah geografis yang sama atau tempat bersama dan masyarakat sebagai

kesamaan kepentingan menurutidentitas dan kebudayaan atau kepentingan bersama.

Fahrudin, (2012) mengemukakan bahwa kesejahteraan berhubungan dengan konsep kualitas hidup (*quality of life*). Sementara itu, Midgley(2005)mengartikan bahwa kesejahteraan sosial sebagai kondisi dalam masyarakat, ialah:

"a state pr condition of human well-being that exists when social problems are managed when human needs are met, and when social opportunities are maximized".

Adi (2013), mengemukakan bahwa beberapa parameter umum yang sesuai dengan kondisi, indonesia yang bisa dipertimbangkan dalam penilaian kesejahteraan masyarakat, yaitu parameter ekonomi, perumahan, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, spiritualitas, jaminan sosial, dan rekreasional.

Menurut Loxshin dan Ravallion dalam(Strauss, 2004), kesejahteraan bisa dilihat dari dua strategi, yaitu kesejahteraan objektif dan kesejahteraan subjektif. Kesejahteraan subjektif bisa dijelaskan sebagai aspek dalam kehidupan, antara lain seperti: lapangan pekerjaan, aktivitas ekonomi, semangat hidup, tingkat independensi, dan *leisure*. Milligan, (2006) mengemukakan bahwa kesejahteraan

objektif adalah derajat kesejahteraan individu atau kelompok menayarakat yang diukur secara seimbang dengan standar tertentu, baik ukuran ekonomi, sosial maupun ukuran lainnya. Demikian, menurut Suandi dalam Skripsi Syakir(2017) menyatakan bahwa kesejahteraan subjektif yaitu tingkat kesejahteraan seorang

individu yang dilihat secara personal yang diukur dalam wujud kepuasan dan

kebahagiaan.

Sen (2000) mengemukakan bahwa tingkat kepuasan (*satisfaction*) dapat

menggambarakan tingkat kemampuan individu dalam mengevaluasi suatu aksi dan

dapat mencapai berbagai kelompok kesejahteraan, sedangkan kebahagiaan

(*happiness*) hanya bisa dirasakan kepada berbagai peristiwa pada kelompok

tertentu untuk aksesnya dengan masyarakat dan instansi. Sementara itu, Pack dan

Goodwin (2003) mengemukakan bahwa kepuasan individu, keluarga maupun

masyarakat dapat menggambarkan derajat kemampuan mengkonsumsi barang

dan jasa serta harapan kedepannya. Suwandi (2006) melakukan penelitian

mengukur kesejahteraan subjek, berdasarkan indeks pemenuhan pangan,

pemenuhan nonpangan, dan pemenuhan investasi.

Dalam *Australian Journal of Social Issue*, mengemukakan bahwa

Amatya Sen, (2000) menganjurkan pendekatan 'kapabilitas' untuk kesejahteraan

pribadi menurut kebebasan dalam memilih. Penciptaan potensi atau kemampuan

manusia bisa meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan keluarga. Kapabilitas yaitu elemen penting dan sangat mendasar

bagi seorang manusia. Melalui peningkatan kapabilitas atau kemampuan yang

dipunya, manusia mampu merespon harapan-harapan yang ada sehingga dapat

memengaruhi perubahan sosial dan ekonomi.

Amatya Sen(2000) menyatakan bahwa barang primer dan pendapatan,

serta kebebasan dan basis sosial harga diri yaitu informasi penting dalam

membandingkan kesejahteraan antarindividu. Walaupun demikian, kepemilikan

barang prior tidak cukup mengacu perbandingan interpersonal atas kesejahteraan. Andaikan kesuksesan ekonomi saja ditentukan oleh pendapat dan indeks-kemewahan tradisional serta kesehatan finansial hingga tujuan utama bagi tercapainya kesejahteraan telah gagal. Kesejahteraan wajib betumpu pada basis informasi yang lebih luas dari preferensi individu, yaitu perbandingan interpersonal kesejahteraan.

Teori kesejahteraan dengan pendekatan kapabilitas scarah dengan konsep kesejahteraan. Kapabilitas menurut Dunn, (2013) mengambatkan tolak ukur evaluasi kebijakan yang meliputi 6 (enam) tipe dimaknai sebagai keberhasilan individu atau organisasi dalam mewujudkan kesejahteraan bagi kehidupannya. Kartasasmita (1996) mengemukakan bahwa keberdayaan yaitu unsur-unsur yang memungkinkan seseorang organisasi ataupun masyarakat yang bertahan (*survive* dan dinamis serta bisa meningkatkan diri mencapai tujuan atau kesejahteraan hidupnya.

Menurut Huraerah dalam Skripsi Rohman (2019) Tingkatan keberdayaan diantaranya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar dan adanya pengusaha serta arah terhadap berbagai sistem dan sumber yang dibutuhkan, dan kesadaran akan berbagai kekuatan, potensi, dan kelemahan diri serta lingkungan. Hal ini bisa terjadi jika setiap individu, oerganisasi atau masyarakat memiliki potensi mengolah dan memanfaatkan modal yang dimilikinya, ibarat modal keuangan (*financial capital*), modal sosial (*social capital*), dan modal intelektual (*intellectual capital*).

Beberapa literatur ekonomi mengatakan bahwa kesejahteraan yaitu bersifat kualitatif yang melibatkan nilai-nilai pandangan hidup suatu masyarakat. Oleh sebab itu, dalam pengukuran kesejahteraan perlu memperhatikan keseimbangan antara unsur material dan nonmaterial. Secara singkat, kedua unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

- 1) Unsur material
Unsur material mencakup kebutuhan fisik dan sosial. Kebutuhan fisik (badan) berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia untuk memperhatikan kelangsungan hidupnya. Kebutuhan tersebut yaitu sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (perumahan/tempat tinggal). Adapun kebutuhan sosial merupakan kebutuhan tersebut yaitu pendidikan, kesehatan, komunikasi, dan transportasi.
- 2) Unsur nonmaterial
Unsur nonmaterial berkaitan dengan kesejahteraan batiniah. Unsur kesejahteraan ini yaitu kebutuhan spiritual, keamanan jiwa/kehidupan, dan kesucian kesempurnaan akal.

Penilaian tingkat kesejahteraan, baik kesejahteraan individu, masyarakat maupun kesejahteraan rakyat bisa menggunakan berbagai pendekatan beserta indeks-indeksnya. Beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan melalui makro dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pendekatan pengukuran kesejahteraan rakyat/masyarakat menurut Badan Pusat Statistik (BPS)

Komponen-komponen yang menjadi indeks kesejahteraan menurut BPS adalah pendidikan, kependudukan, kesehatan dan gizi, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, dan juga indeks sosial lainnya.

- 2) Pendekatan pengukuran kesejahteraan dengan menggunakan indeks Kesejahteraan Rakyat (Iktar)
- 3) Pengukuran derajat kesejahteraan rakyat dengan menggunakan Indeks

Kesejahteraan Rakyat (Iktar) dikembangkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia yang diluncurkan pada tanggal 21 Maret 2012. Indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat di Indonesia. Selain itu, Iktar digunakan pula untuk memiliki keberhasilan pembangunan inklusif dan ketersediaan akses terhadap pemenuhan hak-hak dasar rakyat di Indonesia.

E. Kerangka Pikir

Dalam kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat, dilakukan evaluasi kebijakan yang meliputi lima tipe sebagai berikut:

- 1) Efektivitas (*Effectiveness*)

Berhubungan dengan apakah suatu subtitusi mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berkenaan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari bagian produk atau layanan atau nilai moneterinya.

2) Kecukupan (*Adequacy*)

Berhubungan dengan seberapa maksimal suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, kesempatan atau nilai yang menimbulkan adanya masalah. Tolak ukur kecukupan menekankan pada efektifnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

3) Pemerataan/Kesamaan (*Equity*)

Indeks ini erat berkaitan dengan rasionalitas legal dan sosial dan mengarah pada distribusi akibat dan usaha di sela-sela kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang berdampak (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil disalurkan. Kebijakan yang dibuat untuk mensalurkan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan publik sewaktu-waktu direkomendasikan atas dasar tolak ukur kesamaan. Tolak ukur kesamaan sangat berkaitan dengan konsepsi yang saling beromba, yaitu keadaan atau kebiasaan dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang mencoba untuk mendistribusikan risorsis dalam masyarakat.

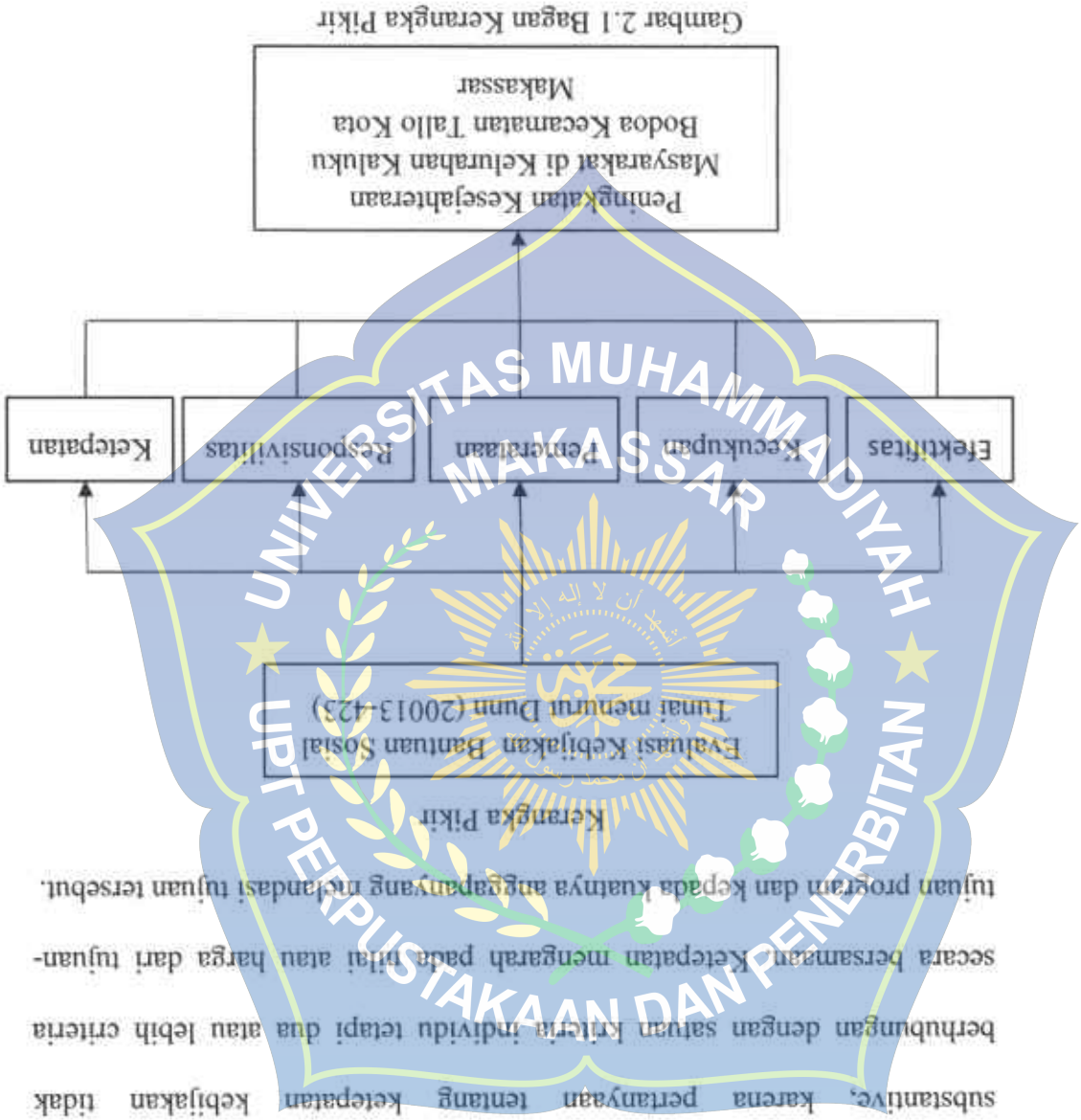
4) Responsivitas (*Responsiveness*)

Berhubungan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan preferensi, kebutuhan, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Tolak ukur responsivitas yaitu penting karena analisis yang dapat memuaskan semua tolak ukur lainnya – efektifitas, kecukupan, kesamaan – masih gagal

apabila belum menanggapi kebutuhan nyata dari kelompok yang seharusnya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

5) Ketepatan (*Appropriateness*)

Ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berhubungan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersamaan. Ketepatan mengarah pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada kuatnya anggapan yang mendasari tujuan tersebut.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi kebijakan bantuan

sosial tunai bagi kesejahteraan masyarakat di masa pandemicovid-19 di Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar dengan menggunakan indikator evaluasi dampak kebijakan publik menurut Dunn (2013) yaitu

efektivitas, kecukupan, pemerataan/kesamaan, responsibilitas, ketepatan dalam kesejahteraan masyarakat yang terjadi di Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar

G. Deskripsi Fokus

Fokus penelitian sebagaimana uraian di atas, menggunakan beberapa konsep yang perlu dideskripsikan agar peneliti ini dapat lebih terarah dan maksud serta tujuan dari penelitian ini dapat dipahami oleh pembaca. Berdasarkan uraian konsep evaluasi kebijakan di atas dimaksudkan agar peneliti fokus pada tujuan yang ingin diteliti.

1. Efektifitas (*Effectiveness*)

Berkaitan dengan apakah suatu alternatif tersebut mendapatkan hasil yang diharapkan para Penerima BST atau mencapai tujuan dari diadakannya Program Kebijakan tersebut.

2. Kecukupan (*Adequacy*)

Berkaitan dengan seberapa jauh tingkat kesuksesan dalam memuaskan kebutuhan, kesempatan, atau nilai yang menimbulkan adanya masalah.

3. Pemerataan/Kesamaan (*Equity*)

Berkaitan dengan apakah Program Kebijakan BST sudah terjadi

pemerataan bagi masyarakat penerima BST tersebut.

4. Responsivitas (*Responsiveness*)

Berkaitan dengan apakah sejauh jauh Program Kebijakan BST

dapat memuaskan kebutuhan, referensi, atau nilai kelompok

masyarakat yang menjadi target kebijakan.

5. Kecepatan (*Appropriateness*)

Berkaitan dengan suatu pernyataan dimana kecepatan suatu

kebijakan terhadap pemecahan masalah yang terjadi ditengah-tengah

masyarakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung mulai Tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan 9

Agustus 2021. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan

Tallo Kota Makassar karena peneliti melihat Program Kebijakan BST tersebut

sudah terimplementasi di daerah tersebut, namun masih ada indikasi bahwasanya

BST tersebut belum tersalurkan dengan benar. Maka peneliti tertarik melakukan

penelitian di Kelurahan Kaluku Bodoa tersebut.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk

memperoleh kebenaran pengetahuan yang bersifat ilmiah, melalui prosedur yang

telah ditetapkan. Penelitian kualitatif ini digunakan agar mampu memahami,

mengambarkan dan menjelaskan berbagai latar belakang masalah penelitian ini

secara mendalam dapat dipertanggungjawabkan.

2. Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu memberikan

gambaran dan melukiskan keadaan di lokasi penelitian berdasarkan fakta yang ada

di lokasi penelitian. Penelitian ini akan menjelaskan tentang Kebijakan Bantuan

Sosial Tunai di Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan

Tallo Kota Makassar.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data

dari penelitian :

1. Data Primer ini diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian berdasarkan

hasil wawancara mendalam dengan informan dan observasi langsung.

Sesuai objek penelitian tentang Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Bagi

Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan

Kalukuboda.

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh penulis melalui tulisan berupa

laporan-laporan, peraturan-peraturan dan dokumen-dokumen yang

berkaitan kebutuhan penelitian yang dilakukan.

D. Informan

Dalam penelitian ini yang akan memberikan informasi kepada peneliti atau

yang akan menjadi informan penelitian yaitu:

pembuktian terhadap informan atau keterangan yang ditemukan sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah alat

2. Wawancara.

Kelurahan Kaluku Bodoa.

sosial tunai bagi kesejahteraan masyarakat di masa pandemi Covid-19 di

untuk melakukan pengamatan langsung terhadap evaluasi kebijakan bantuan

Observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti

1. Observasi.

menggunakan teknik :

Proses pengumpulan data dikumpulkan dalam penyusunan proposal

E. Teknik Pengumpulan Data

No.	Nama	Inisial	Jabatan/Pekerjaan
1	Muh. Amir Nur., SH., M.Si	MAN	Kepala Kelurahan Kaluku Bodoa
2	Andi Muthmainnah	AM	Sekretis Kelurahan Kaluku Bodoa
3	Kamaruddin	K	RT 007
4	Rahmawati	R	Penerima BST
5	Hane	H	Penerima BST
6	Nursiah	NS	Penerima BST
7	Hasmawati	HW	Penerima BST
8	Siti Maemunah	SM	Penerima BST

Daftar Informan Penelitian

Tabel 3.1

Teknik wawancara yang dipakai dalam penelitian kualitatif yaitu wawancara

mendalam.

3. Dokumen/ Arsip

Dokumentasi merupakan salinan, laporan tertulis atau daftar pendataan

yang didapatkan terkait dengan penelitian yang dilakukan

F. Teknik Analisis Data

Miles and Huberman (dalam Sugiono, 2010) menjelaskan bahwa analisis data

dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)
Mereduksi data yang berarti merangkum, mengambil hal-hal yang pokok, mengutamakan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya.

2. Penyajian Data (*Display*)

Pada penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk bagan, uraian singkat, serta hubungan antar kategori dari sejenisnya.

3. Verifikasi Data (*Conclusions drawing/verifying*)

Langkah terakhir dalam teknik analisis data menurut Miles and Huberman

adalah penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang

sebelumnya belum pernah ada.

G. Teknik Pengabsahan Data

Salah satu cara paling penting dan mudah dalam ujian pengabsahan hasil

penelitian adalah dengan melakukan triangulasi. Sugiyono (2010), teknik

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kota Makassar

Kota Makassar menjadi salah satu pemerintahan kota yang beradadi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk berdasarkan UUD Nomor 29 Tahun 1959 mengenai Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, seperti yang tercantum pada Lembaran Negara Republik Indonesia pada Tahun 1959 No.74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1822. Kota Makassar merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan menurut Undang-Undang nomor 13 pada Tahun 1965. (Lembaran Negara Pada Tahun 1965 Nomor 94), kemudian menurut Undang-Undang Nomor 8 pada Tahun 1965 Daerah Tingkat II Kotapraja Makassar dirubah menjadi Daerah Tingkat II Kotamadya Makassar. Pada 31 Agustus 1971, Kota Makassar berganti menjadi Ujung Pandang, maka wilayahnya dimekarkan dari 21 km² menjadi 175,77 km² dengan mengambil sebagian wilayah yang ada di kabupaten lain seperti Gowa, Maros, dan Pangkajene Kepulauan, seperti berdasarkan Peraturan Pemerintah No.51 pada Tahun 1971 mengenai batas-batas Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene Kepulauan, dalam lingkup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Sejak perkembangannya, nama Kotamadya Makassar di ubahkembali menjadi Kota Makassar menurut Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 1999 tentang perubahan nama Kotamadya Ujung Pandang di ubah menjadi Kota Makassar.

pengumpulan data dan triangulasi diartikan sebagai pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurut ada tiga macam triangulasi yaitu :

a. Triangulasi Sumber .

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan satu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

b. Triangulasi Teknik.

Triangulasi teknik untuk menguji integritas data dilakukan dengan cara memeriksa data untuk sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya, data yang diperoleh dengan teknik wawancara, kemudian dicek dengan observasi, kuesioner, atau dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut. Untuk menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber

c. Triangulasi Waktu.

Waktu juga sangat mempengaruhi kredibilitas data yang diperoleh. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada narasumber masih segar, belum banyak masalah, maka akan memberikan data yang lebih valid. Oleh karena itu dalam rangka menguji kredibilitas data maka dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan melalui wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Jika hasil uji menghasilkan data yang tidak valid, maka dilakukan pengecekan hasil penelitian secara berulang-ulang, sedangkan tim peneliti lain bertugas melakukan pengumpulan data.

hal tersebut atas keinginan masyarakat didukung oleh DPRD Tk. II Ujung Pandang pada saat itu, serta mendapat masukan dari kalangan budayawan, sejarawan, pemerhati hukum, pelaku bisnis, dan seniman. Hingga pada Tahun 2018 Kota Makassar sudah berusia ke-411 tahun sesuai dengan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2000 yang ditetapkan hari jadi Kota Makassar pada tanggal 9 November 1607, terus berkembang menjadi sebuah Kota Dunia yang bermanfaat tidak hanya sebagai jasa dan pusat perdagangan, akan tetapi juga sebagai pusat kegiatan industri, pusat kegiatan edu-entertainment, pusat kegiatan pemerintahan, pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, udara maupun laut.

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Di Kota Makassar luas wilayah tercatat ada 175,77 km² dengan melihat batas-batas wilayah administratif dapat dilihat sebagai berikut

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Maros
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

Menurut administrasi, Kota Makassar mempunyai 15 kecamatan, terdiri dari Kecamatan Maros, Tamalate, Mamajang, Rappocini, Ujung Pandang, Makassar, Wajo, Ujung Tanah, Bontoala, Tallo, Panakukang, Biringkanaya, Manggala, Tamalanrea, dan Kep. Sangkarrang. Sejak tahun 2021, jumlah kelurahan yang ada di Kota Makassar tercatat mempunyai 153 kelurahan, 996 RW, dan 4964 RT.

Tidak hanya memiliki wilayah daratan, akan tetapi Kota Makassar pun

memiliki wilayah kepulauan yang bisa dilihat sepanjang garis pantai di Kota Makassar. Pulau ini memiliki gugusan pulau-pulau karang berjumlah 12 pulau, termasuk bagian dari gugusan pulau-pulau sangkarang, atau dapat disebut pula pulau-pulau pabbiring, atau biasa dikenal dengan sebutan kepulauan Spermonde.

Pulau-pulau tersebut yaitu 1) Lajung, 2) Pulau Lumu-Lumu, 3) Pulau

Langkai, 4) Pulau Bonetambung, 5) Pulau Barrang Lompo, 6) Pulau

Kodingareng Lompo, 7) Pulau Kodingareng keke, 8) Pulau Barrang Caddi, 9).

Pulau Samajona, 10) Pulau Lac-Lac kecil, 11) Pulau Lac-Lac, dan yang terakhir

12) Pulau Kayangan.

b. Letak Geografis dan Topografi

Kota Makassar terletak berada antara $119^{\circ}24'17''38''$ Bujur Timur dan $5^{\circ}8'$

$6'19''$ Lintang Selatan. Dilihat dari geografis, letak Kota Makassar berada pada

posisi strategis karena terdapat di Persimpangan jalur lalu lintas mulai dari arah

utara sampai selatan pada kepulauan Indonesia dan berkedudukan sebagai pintu

gerbang keluar dan masuknya barang perdagangan di Sulawesi Selatan yang

merupakan sumber perekonomian prioritas di Kota Makassar. Wilayah Kota

Makassar menjadi daya pikat bagi para penduduk-penduduk daerah lain untuk

mencari lowongan pekerjaan, baik sebagai wirasaha maupun sebagai pegawai.

Tiap tahunnya masyarakat dari luar negeri juga semakin meningkat dikarenakan

potensi kuliner khas Makassar dan pariwisata juga menarik minat mereka.

Adapun Topografi wilayah Kota Makassar mempunyai ciri-ciri tanahnya

relatif datar, berbukit, bergelombang, dan berada di ketinggian 0-25 m di atas

atau kampung sinassara yang berada di area perdagangan dan jasa. Asal usul Kecamatan Tallo Kota Makassar. Di Kelurahan ini juga dikenal sebagai paccelang Sebagaiadministratif, Kelurahan Kaluku Bodoa berada dalam wilayah

2. Sejarah Kelurahan Kaluku Bodoa

paling sedikit penduduk pada usia 70-74 tahun.

penduduknya sebagian besar berada pada jumlah kelompok usia 15-29 tahun dan didominasiakan relatif penduduk usia muda. Dapat di lihat dari konsentrasi bahwa Dapat dilihat dari struktur penduduk, bahwa masyarakat Kota Makassar penduduk perempuan 714/817 jiwa berjumlah 1.423.877 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 709.060 jiwa dan Berdasarkan proyeksi Penduduk Kota Makassar pada tahun 2020 adalah mencari lowongan pekerjaan.

yang dapat berkembang cukup pesat sampai akhirnya menjadi alternatif untuk dikarenakan Kota Makassar merupakan ibu kota di Provinsi Sulawesi Selatan penduduk Kota Makassar dikuasileh penduduk remaja atau dewasa, hal tersebut suku Makassar, Mandar, Bugis, Buton, Tionghoa, Jawa dan lainnya. Komposisi Wilayah Kota Makassar mengembangkan kota yang aneka suku mulai dari c. Penduduk industri, jasa, pelabuhan laut, dan juga fasilitas penunjang lainnya.

Makassar berpotensi pada pengembangan permukiman, rekreasi, perdagangan, kemiringan 0-2%=85%; 2-3%=10%; 3-15%=5%. Hal ini memungkinkan Kota Sedangkan, dilihat dari klarifikasi kelengannya, membuktikan bahwa permukaan laut pada tingkat kemiringan lereng berada pada kemiringan 0-15%.

dari Kelurahan Kaluku Bodoa yang berasal dari kata Kaluka Bodoa, artinya kelapa pohon kelapa yang berukuran pendek. dinamakan kelurahan kaluku bodoa dikarenakan daerah ini banyak ditumbuhi

Kelurahan ini memiliki 7 RW dan 51 RT pada luas wilayah 0.89 km². Dengan jumlah penduduk di Kelurahan Kaluku Bodoa tahun 2020 ditempati 5.201 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 22.753 jiwa yang mencakup laki-laki 11.359 dan perempuan 11.394.

Kelurahan Kaluku Bodoa mempunyai sejarah yang *historis* dikarenakan salah satu penyebar islam di Indonesia Timur yang di makamkan di daerah ini, yakni makam Darul Ribandang Banyak perusahaan besar di Kelurahan Kaluku Bodoa seperti di Galangan Kapal, Industri Kapal Indonesia, Marga Nusantara, Bosowa, Gudang Grama, Indomarco. Wilayah Kecamatan Tallo ini dijadikan sebagai kawasan perdagangan, jasa, dan industri. Selain potensi sejarah, di Kelurahan Kaluku Bodoa mempunyai mesjid yang unik yaitu mesjid ijabah, disiniterdapat juga pantai Galangan Kapal, dan juga pengrajin souvenir terbuat dari sutra beserta kue tradisional barusa dan putu cangkir.

3. Letak Geografis

Wilayah Kelurahan Kaluku Bodoa terletak di sebelah utara perbatasan dengan Laut Selat Makassar, sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Ujung Pandang Baru dan Kelurahan Suangga. Sebelah timur berbatasan dengan

Kalurahan Kaluku Bodoa dan sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan

Pannampu dan Kelurahan Camba Berna.

Kaluku Bodoa merupakan salah satu diantara dua kampung yang ada di

Galangan Kapal, lokasinya berada dipesisir Selatan yang ada di dalam Kecamatan

Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan luas wilayahnya 0.89 km².

Penduduk yang menempati sebanyak 22.753, dengan jumlah 11.359 laki-laki

Jumlah Penduduk	22.753 jiwa
Laki-Laki	11.359 jiwa
Pemampuan	11.394 jiwa
Jumlah Kartu Keluarga (KK)	5.201 KK

Tabel 4.1.
Jumlah Penduduk Kelurahan Kaluku Bodoa

4. Batas-Batas Wilayah

Adapun batas-batas wilayahnya sebagai berikut: sebelah utara Galangan

Kapal PT IKI (Industri Kapal Indonesia), sebelah selatan SMA Negeri 17

Makassar, sebelah barat Pelabuhan Paotere dan sebelah timur jalan Tol

Reformasi.

Penduduk asli Kaluku Bodoa merupakan suku Makassar dan Bugis, adapun

bahasa yang digunakan dalam sehari-hari yakni bahasa Makassar, mereka

menganut agama islam, dan juga beberapa penganut agama lain seperti Katholik

dan Kristen Protestan.

5. Keadaan Sosial Ekonominya

Keadaan Sosial ekonomi suatu daerah banyak ditentukan oleh keadaan

wilayah pertanahannya. Kelurahan Kaluku Bodoa termasuk kawasan industri dan daerah pergudangan. Jadi masyarakat Kaluku Bodoa sebagian berprofesi sebagai

kawasan swasta. Jumlah penduduk Kelurahan Kaluku Bodoa tercatat pada tahun

2020 sebanyak 22.753 jiwa terbagi menjadi 5.201 KK dan jumlah penerima BST

sebanyak 346 KK jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kelurahan Kaluku

Bodoa, jumlah penerima BST hanya sebesar 6,67%.

Tabel 4.2

Perbandingan Jumlah Penduduk Dengan Penerima BST

Jumlah Penduduk Kelurahan Kaluku Bodoa	5.201 KK
Jumlah Penerima BST	346 KK
Perbandingan antara Jumlah Penduduk dan Jumlah Penerima	6,67%

B. Hasil Penelitian

Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Bagi Kesejahteraan Masyarakat di

Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar.

Penyaluran Program kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan

Kaluku Bodoa. Penelitian ini memakai teori evaluasi yang dikemukakan William

N Dunn yang mencakup 5 indikator yang berkaitan dengan evaluasi program.

Diharapkan dengan adanya teori ini dapat menjelaskan secara jelas mengenai

evaluasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Kaluku Bodoa.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti diperoleh dari hasil

wawancara evaluasi kebijakan bantuan sosial tunai bagi kesejahteraan masyarakat

di Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar yang dikemukakan

oleh William N Dunn:

1. Efektifitas

Ada beberapa indikator yang akan diteliti Untuk mengetahui bagaimana

hasil dari evaluasi suatu program BST, yang pertama yaitu efektifitas. Efektifitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang akan dicapai. Menurut Sedarmayanti (2009: 59) Efektifitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh target yang dapat tercapai. Secara umum, efektifitas menggambarkan sejauh mana tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan. Tujuan adalah hal yang paling penting dalam mengukur efektifitas suatu kebijakan.

Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan program pemerintah yang sifatnya nasional dan bertujuan untuk membantu mengurangi beban pengeluaran setiap rumah tangga penerima manfaat guna memenuhi kebutuhan pokok berupa Tunai, untuk melihat suatu efektifitas kebijakan BST di Kelurahan Kaluku Bodoa, dapat dilihat dari seberapa maksimal tujuan kebijakan ini dapat tercapai.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Kepala Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar tentang efektifitas Kebijakan BST.

“dalam pelaksanaan kebijakan BST apakah hasil yang diinginkan telah tercapai? Nah mengenai pertanyaan, berbicara tentang efektifitas sudah cukup efektif, namun tidak menutup kemungkinan tentu ada warga kurang puas dimana ada beberapa yang layak menerima secara fakta dilapangan. Namun, hal itu disebabkan karena data yang kurang efektif (data tidak mengikuti perkembangan) jadi masyarakat yang seharusnya menerima malah tidak terdaftar” (hasil wawancara dengan MAN pada tanggal 30 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian tujuan program kebijaksanaan BST ini sudah cukup efektif meskipun masih banyak masyarakat yang berhak mendapat dan kouta penerima terbatas. Dengan demikian, ditinjau dari tujuan program BST sudah sangat jelas kalau program kebijaksanaan ini sudah cukup efektif.

Hal tersebut senada dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Kelurahan

Kaluku Bodoa yang menyatakan bahwa:

“dalam pelaksanaan kebijaksanaan BST apakah hasil yang diinginkan telah tercapai? mengenai efektivitasnya yah Alhamdulillah cukup tercapai bagi penerima, apabila tidak ada kebijaksanaan ini maka akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya.” (hasil wawancara dengan A M pada tanggal 30 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa suatu

alternatif sudah cukup tercapai dengan diadakannya program kebijaksanaan tersebut.

Kebijakan tersebut sudah terlaksana dan sudah cukup dalam meningkatkan beban

kebutuhan di masa pandemi Covid-19.

Namun berdasarkan pernyataan narasumber, dalam hal ini ada beberapa

masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan, masyarakat tersebut masuk dala

kategori layak menerima bantuan, akan tetapi namanya belum terdaftar dalam

penerima BST tersebut.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan salah satu Tokoh masyarakat

di Kelurahan Kaluku Bodoa mengenai Efektivitas BST.

“Dalam pelaksanaan kebijaksanaan BST, apakah hasil yang diharapkan penerima sudah tercapai? Kalau kita lihat di kondisi sekarang ini BST sudah berjalan dan penerima sudah menikmati bantuan tersebut dan sudah efektif sesuai prosedurnya. Jadi suda bisa dikatakan sudah cukup bagus karena penerima sudah menikmati.” (hasil wawancara dengan K pada tanggal 8 Juli 2021)

“Apakah setelah mendapat BST sudah menyelesaikan permasalahan ekonomi? kalau menurut saya, belum karena dengan jumlah begitu dibandingkan dengan kebutuhannya kami sangat banyak, apalagi saya hanya sendiri jadi banyak pengeluaran yang harus saya keluarkan” (hasil wawancara dengan H pada tanggal 1 Juli 2021)

efektivitas Kebijakan BST.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan penerima BST tentang

memenuhi kebutuhannya.

kebutuhan keseluruhan, namun setidaknya dapat menutupi dan membantu

menyelesaikan permasalahannya, walaupun tidak sepenuhnya memenuhi

Menurut narasumber, dengan adanya kebijakan BST dapat membantu

karena dengan bantuan tersebut dapat menutupi kebutuhannya.

dinamasi pandemi sekarang ini, bantuan tersebut sangat berpengaruh bagi penerima,

tersebut mendapatkan hasil yang telah tercapai. Narasumber menyatakan bahwa

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa bantuan

tanggal 28 Juni 2021).

setidaknya memenuhi kebutuhan saya.” (hasil wawancara dengan R pada

walaupun tidak memenuhi keseluruhan kebutuhan keluarga saya,

memberikan bantuan tersebut. Dengan mendapat bantuan tunai,

tercapai, karena di masa pandemi seperti sekarang ini kami sangat

permasalahan ekonomi? menurut saya hasil yang saya inginkan sudah

“setelah mendapat BST tersebut, apakah sudah dapat menyelesaikan

menyatakan bahwa:

Hal tersebut senada dengan hasil wawancara dengan penerima BST yang

BST ini sudah cukup efektif apalagi penerima sudah dapat menikmati.

dan para penerima sudah menikmati hasil dari program tersebut. Jadi, program

pandemi seperti sekarang ini program BST sudah berjalan sebagaimana mestinya

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa di kondisi

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa program BST ini belum efektif, karena belum bisa memenuhi kebutuhan penerima sepenuhnya apalagi dengan pengeluaran yang banyak.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan penerima BST tentang

efektivitas Kebijakan BST.

"Setelah mendapatkan BST apakah sudah dapat menyelesaikan permasalahan? Menurut saya pencapaiannya itu sudah cukup efektifmi, karena dengan adanya program BST ini sudah dapat mi membantu memenuhi, jadi kami dapat merasa terbantu dari ini bantuan." (hasil wawancara dengan NS pada tanggal 1 Juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian

suatu BST yang sudah didistribusikan kepada penerima sudah cukup efektif.

Dengan adanya BST masyarakat penerima sudah merasa terbantu, karena berkat

BST sudah dapat membantu kebutuhannya.

Hal tersebut senada dengan hasil wawancara dengan penerima BST yang

menyatakan bahwa:

"Apakah dalam pelaksanaan BST sudah mendapatkan hasil yang tercapai? Menurut saya iya sudah tercapai karena dengan mendapat bantuan sudah menambah perekonomian keluarga saya di masa pandemi ini. Jadi bantuan ini sudah membantu." (hasil wawancara dengan HW pada tanggal 8 Juli 2021)

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa hasil yang

telah dicapai masyarakat penerima sudah cukup baik, dengan adanya

abntuan sudah dapat membantu perekonomian keluarga yang belum terpenuhi

apalagi di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan penerima BST tentang

efektivitas Kebijakan BST.

"dalam pelaksanaan BST, apakah sudah mendapatkan hasil yang diharapkan penerima BST? menurutku belum cukup efektif, karena dengan jumlah yang begitu belum mampu memenuhi perekonomian sepenuhnya. Tetapi sudah mampu menutupi sedikit beban kebutuhan keluarga saya" (hasil wawancara dengan SM pada tanggal 13 Juli 2021)

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan BST menurut narasumber adalah belum cukup efektif. Hal tersebut dikarenakan dengan jumlah yang didistribusikan masih belum cukup untuk memenuhi perekonomian masyarakat menengah kebawah. Akan tetapi, BST ini sudah mampu menutupi sebagian kebutuhan keluarga masyarakat di masa pandemi sekarang.

2. Kecukupan

Pada kebijakan publik, kecukupan dapat diartikan sebagai seberapa jauh hasil yang sudah dicapai untuk memecahkan masalah. Menurut Dunn (2013:430) kecukupan berkaitan dengan seberapa jauh hasil suatu efektivitas dapat memuaskan kebutuhan, kesempatan, atau nilai, yang menimbulkan adanya masalah. Jadi kecukupan memiliki hubungan dengan efektivitas dalam evaluasi kebijakan publik dalam mengukur seberapa jauh alternatif yang ada dapat memenuhi kebutuhan.

Kebijakan BST diberikan kepada masyarakat yang menurut perekonomiananya dibawah garis kemiskinan apalagi dimasa pandemi. Pemerintah menyalurkan bantuan berupa Dana BST yang jumlahnya ditetapkan secara proporsional.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Kepala Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar tentang kecukupan BST.

“seberapa jauh hasil yang telah tercapai dalam memecahkan masalah? kalau dalam hal ini hanya dapat meringankan beban, namun tidak menyelesaikan persoalan kesehatan, karena peningkatan kesejahteraan tentu berbenturan dengan penyelesaian kasus Covid-19” (hasil wawancara dengan MAN pada tanggal 30 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam

pemecahan masalah harus menghasilkan tujuan yang tercapai. Dengan adanya hasil, makanya bisa dikatakan mampu mengatasi masalah tersebut dilihat dari keberhasilan kebijakan tersebut.

Menurut narasumber, dalam hal ini kebijakan BST hanya mampu

meringankan beban kebutuhan, namun tidak dapat menyelesaikan persoalan kesehatan masyarakat luas. Peningkatan kesejahteraan tentu sangat

berpengaruh, hal itu disebabkan karena kasus yang sedang terjadi di masa pandemi covid-19.

Hal tersebut senada dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Kaluku Bodoa yang menyatakan bahwa:

“seberapa jauh hasil yang telah tercapai dalam memecahkan masalah? seperti jawaban pertama, bantuan tersebut sudah cukup meringankan beban di masa pandemi seperti sekarang ini” (hasil wawancara dengan AM pada tanggal 30 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat di simpulkan bahwa dari

pemecahan masalah bantuan tersebut sudah tercapai. Hasil yang diharapkan sudah cukup untuk penema BST. Bantuan tersebut sudah bisa meringankan sedikit dari

persoalan masalah kebutuhan para penerima.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan salah satu Tokoh masyarakat

di Kelurahan Kaluku Bodoa mengenai Kecukupan BST.

“seberapa jauh hasil yang telah tercapai dalam memecahkan masalah? Kalau mengenai tercupiknya masih jauh dari kebutuhannya karena kita ini masyarakat khususnya di keluarga ini banyak masyarakat menengah kebawah dan masih jauh dari apa yang mereka butuhkan, setidaknya dapat menutupi kebutuhan di masa pandemi” (hasil wawancara dengan K pada tanggal 8 Juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa program

BST tersebut masih jauh dari kata tercupi dalam memenuhi kebutuhan

masyarakat, mengingat masyarakat yang mendapatkan kebanyakan perekonomian

menengah kebawah dengan program ini belum bisa memenuhi kebutuhan

masyarakat sepenuhnya tetapi sudah bisa membantu menutupi kebutuhan

masyarakat.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Penerima BST tentang

kecupan BST.

“seberapa jauh hasil yang telah tercapai dalam memecahkan masalah? Iya, alhamdulillah betul sangat membantu, menurut saya BST ini setidaknya dapat membantu perekonomian keluarga saya, karena dengan bantuan tersebut saya dapat membeli beras, gula, minyak untuk kebutuhan rumah tangga saya.” (hasil wawancara dengan R pada tanggal 28 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan

BST sangat membantu dalam memecahkan masalah. Penerima BST merasa sangat

dibantu oleh kebijakan tersebut, karena dapat membantu dalam urusan bahan

pokok. Dalam hal ini, kebijakan tersebut dapat memecahkan masalah dalam

masyarakat walaupun tidak sepenuhnya terpenuhi.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan penerima BST tentang

kecupan Kebijakan BST.

“Apakah BST ini dapat memuaskan kebutuhan penerima dalam hal memenuhi kebutuhan di masa pandemi? sama halnya jawaban pertama, tidak dapat memuaskan kebutuhan karena yang kami terima dengan

jumlah Rp. 600.000 sedangkan saya seorang lansia yang sudah tidak punya lagi pencari uang.” (Hasil wawancara dengan H pada tanggal 1 Juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam memusaskan kebutuhan masih dikatakan belum dapat tercapai. Jumlah yang didistribusikan kementerian sosial masih belum dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, apalagi penerima adalah seorang lansia yang sudah tidak mempunyai mata pencaharian.

Berikut kumpulan wawancara penulis dengan Penerima BST tentang kecukupan BST

“seberapa jauh hasil yang diharapkan dapat tercapai? menurut ku ini sudah mencukupi mi, karena kami masyarakat yang perekonomiannya dibawah standar dan juga jumlah yang diberikan setidaknya sudah sedikit membantu” (hasil wawancara dengan NS pada tanggal 1 Juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan suatu program BST sudah dapat mencukupi. Apalagi masyarakat dengan perekonomian yang dibawah standar dengan jumlah yang didistribusikan sudah bisa membantu kebutuhan masyarakat penerima bantuan.

Hal tersebut senada dengan hasil wawancara dengan penerima BST yang

menyatakan bahwa:

“apakah biaya dan manfaat yang diberikan kepada penerima sudah merata? Menurut saya dalam memenuhi kebutuhan di masa pandemi belum sepenuhnya, tapi alhamdulillah karena sudah dapat setidaknya sudah menutupi mi.” (hasil wawancara dengan HW pada tanggal 8 Juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan program BST dalam memenuhi kebutuhan masyarakat penerima di masa pandemi Covid-19 belum sepenuhnya terpenuhi, tetapi dengan adanya program bantuan

tersebut masyarakat telah mendapatkan bantuan karena telah membantu menutupi kebutuhannya.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan penerima BST tentang Kecukupan Kebijakan BST.

"apakah BST ini sudah dapat memuaskan kebutuhan masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan di masa pandemi? kalau dibidang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari belum cukup, karena saya bilang sebelumnya dengan jumlah 600/bulan tidak cukup. Akan tetapi kita sebagai masyarakat penerima tetap bersyukur dengan adanya bantuan ini" (hasil wawancara dengan SM pada tanggal 13 Juli 2021)

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa menurut narasumber dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari di masa pandemi seperti sekarang dengan jumlah seperti yang sudah didistribusikan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan perekonomian. Namun, sebagai masyarakat menengah kebawah harus tetap bersyukur karena adanya bantuan ini sudah dapat membantu menutupi beban kebutuhan keluarga.

3. Pemerintahan

Menurut Dunn (2013:434) Pemerintahan dalam kebijakan publik adalah kesamaan erat yang berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial yang mengarah pada distribusi usaha dan akibat antara kelompok-kelompok yang beragam dalam masyarakat. Dalam indikator evaluasi ini, pemerintahan harus dapat menjawab pertanyaan mengenai "Apakah manfaat dan biaya yang didistribusikan dengan merata bagi kelompok-kelompok yang berbeda?".

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Kepala Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar tentang kecukupan BST.

“apakah biaya dan manfaat di distribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok berbeda? saya kira sifatnya BST sudah di atur oleh kementerian sosial, jadi jumlah besarnya sudah merata sebanyak Rp. 600.000 yang diterima oleh masing-masing penerima BST ” (hasil wawancara dengan MAN pada tanggal 30 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa biaya

manfaat yang didistribusikan ke penerima BTS telah disalurkan secara merata.

Dalam kelompok-kelompok yang berbeda, masing-masing penerima BST

menerima jumlah besaran biaya yang merata.

Dalam hal ini, Kementerian Sosial sendiri telah mengatur dan menetapkan

jumlah BST yang akan didistribusikan sebesar Rp. 600.000 kepada setiap penerima

bantuan secara merata.

Hal tersebut senada dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Kelurahan

Kaluku Bodea yang menyatakan bahwa:

“apakah biaya dan manfaat di distribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok berbeda? mengenai biaya dan manfaat yang didistribusikan, data yang keluar dari kementerian sosial disesuaikan dengan data lapangan, jadi semua penerima kelompok yang berbeda mendapatkan jumlah yang sama besar” (hasil wawancara dengan AM pada tanggal 30 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa biaya dan

manfaat yang didistribusikan kepada kelompok-kelompok sudah secara merata.

Menurut data yang keluar dari kementerian sosial, biaya sesuai dengan yang ada di

lapangan. Jumlah dan besarnya didistribusikan secara merata kepada penerima

BST. Jadi, setiap penerima, mereka masing-masing mendapatkan jumlah yang

sama dan merata.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan salah satu Tokoh masyarakat di Kelurahan Kaluku Bodoa mengenai Pemerintahan BST.

"apakah biaya dan manfaat yang didistribusikan merata pada kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda? Kalau saya lihat biaya yang didistribusikan itu sudah merata karena langsung dari Kementerian itu sendiri." (hasil wawancara dengan K pada tanggal 8 Juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa biaya dan manfaat yang didistribusikan sudah merata telah dibagikan kepada masyarakat penerima bantuan, jumlah sudah semestinya merata karena telah ditentukan sendiri oleh kementerian sosial.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Penerima BST tentang Pemerintahan BST.

"apakah biaya dan manfaat di distribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok berbeda? Iya, sudah merata. Karena beberapa teman yang saya remani pas pengambilan, semuanya itu dengan jumlah yang samah, semua penerima mendapatkan jumlah yang merata." (hasil wawancara dengan R pada tanggal 28 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan biaya dan manfaat yang disalurkan oleh kementerian sosial telah merata. Jumlah yang diterima penerima BST sudah tersalurkan dengan merata, karena telah ditetapkan sejumlah dana yang disalurkan dengan merata.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan penerima BST tentang pemerataan Kebijakan BST.

"apakah biaya dan manfaat yang disalurkan sudah merata? Menurut saya sudah merata karena biaya yang langsung dari pusat." (hasil wawancara dengan H pada tanggal 1 Juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa biaya dan manfaat yang didistribusikan kepada penerima sudah merata karena telah ditentukan jumlahnya dari kementerian sosial sendiri.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Penerima BST tentang

Pemerataan BST.

"apakah BST ini sudah merata di dan didistribusikan secara adil? Menurutku pemerataannya sudah jelas merata karena jumlahnya sama semua! ke masing-masing penerima BST" (hasil wawancara dengan NS pada tanggal 1 Juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemerataan

yang terjadi di lapangan semuanya berjumlah yang sama dan sudah didistribusikan

secara adil dan merata.

Hal tersebut senada dengan hasil wawancara dengan penerima BST yang

menyatakan bahwa:

"mengenal pemerataan apakah biaya dan manfaat sudah didistribusikan secara merata? Iya menurut saya sudah merata, karena setiap saya jumlah yang keluar sudah ditentukan menang di kementerian jadi kita semuanya dapat jumlah yang sama" (hasil wawancara dengan HW pada tanggal 8 Juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pemerataan

program BST ini sudah merata didistribusikan kepada masyarakat penerima.

Karena biaya dan manfaat sudah diberikan kementerian sosial dengan jumlah

yang telah ditetapkan.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Penerima BST tentang

Pemerataan BST.

"apakah biaya dan manfaat yang didistribusikan merata pada kelompok masyarakat yang berbeda? Kalau jumlah yang diterima masyarakat sudah

merata, karena jumlahnya memang sudah di atur sama pemerintah, sisanya kita cuma menerima dengan jumlah tersebut.” (hasil wawancara dengan SM pada tanggal 13 Juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa setiap

biaya dan manfaat yang sudah didistribusikan dengan merata. Karena telah disampaikan sebelumnya, jumlah yang dikeluarkan kementerian sosial sudah di atur sedemikian rupa yang disalurkan kepada masyarakat secara merata dan adil

4. Responsivitas

Menurut Dunn (2013:437) Responsivitas berhubungan dengan seberapa jauh suatu program kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, nilai, atau preferensi kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Adapun kriteria responsivitas itu sangat penting sebab analisis yang dapat memenuhi semua kriteria lainnya (efektivitas, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menjangkau kebutuhan aktual dari kelompok yang seharusnya diuntungkan dari adanya suatu program kebijakan.

Dalam kebijakan publik Responsivitas diartikan sebagai respon atau tanggapan dari sasaran kebijakan publik terhadap suatu kebijakan, oleh sebab itu, kebijakan dapat dilihat dari masyarakat jika keberhasilan program ini cukup baik.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Kepala Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar tentang Responsivitas BST.

“ apakah hasil kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, referensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu? dalam hal memuaskan kebutuhan masyarakat tentu sudah dapat terjawab, namun hal tersebut hanya dapat mengingatkan saja, tidak untuk memenuhi kebutuhan.” (hasil wawancara dengan MAN pada tanggal 30 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dari dari suatu kebijakan ditentukan dengan hasil yang dapat memuaskan kebutuhan,

referensi atau nilai dalam kelompok tertentu. Dalam hal ini, kebijakan BST telah menjawab persoalan tentang memuaskan kebutuhan penerima. Namun, berdasarkan dari hasil wawancara, bantuan tersebut hanya meringankan kebutuhan saja dan tidak memenuhi seluruh kebutuhan.

Hal tersebut senada dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Kaluku Bodoa yang menyatakan bahwa:

"mengenal BST, apakah hasil kebijakan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhannya, para penerima sudah merasa cukup karena sudah dapat mengunangi kebutuhan" (hasil wawancara dengan AM pada tanggal 30 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa kebijakan BST sudah mampu mencukupi kebutuhan penerima. Dengan kebijakan tersebut, penerima sudah merasa cukup terpenuhi karena sudah dapat membantu mengurus kebutuhan di masa pandemi Covid-19 ini.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan salah satu Tokoh masyarakat di Kelurahan Kaluku Bodoa mengenai Responsivitas BST.

"sejauhmana tingkat keberhasilan program kebijakan BST ini dalam memuaskan kebutuhan masyarakat? Kalau BST sudah berjalan sesuai dengan diperuntukkan, memang sudah mempunyai respon yang bagus cuman karena pelaksanaannya itu sudah melenceng dari apa yang diharapkan pemerintah karena ada yang berhak dapat tetapi tidak terdaftar, karena datanya tidak diperbaharui" (hasil wawancara dengan K pada tanggal 8 Juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa program kebijakan BST sudah berjalan dengan semestinya dan mendapatkan respon yang bagus dari masyarakat penerima. Namun, dalam pelaksanaan program BST ini masih ada masyarakat yang lebih berhak mendapatkan bantuan namun tidak terdaftar sebagai penerima, itu dikarenakan data yang masih belum diperbaharui.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Penerima BST tentang

Responsivitas BST.

“apakah hasil kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, referensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu? Tanggapan saya yah alhamdulillah sudah membantu sekali, dan kalau bisa diperpanjang lagi bantuan dananya” (Hasil wawancara dengan R pada tanggal 28 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan BST sudah dapat memuaskan kebutuhan yang dimana sudah bisa membantu untuk menyelesaikan masalah. Dengan harapan apabila kedepannya sebisa mungkin untuk memperpanjang kebijakan tersebut, apalagi masih di pandemi Covid-19 ini.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Penerima BST tentang Responsivitas BST.

“sejauh mana tingkat keberhasilan BST ini untuk penerima BST? apakah sudah Respon dari saya sudah lumayan memadai untuk membayai kebutuhan saya, walaupun itu belum mencukupi tapi setidaknya sudah memenuhi kebutuhan.” (hasil wawancara dengan H pada tanggal 1 Juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan BST sudah lumayan memadai dalam pemenuhan kebutuhan penerima, walaupun kebutuhan belum tercukupi setidaknya mampu menutupi sebagian kebutuhan.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Penerima BST tentang Responsivitas BST.

“Sejauh mana tingkat keberhasilan Program BST ini dalam memuaskan kebutuhan masyarakat? Menurut ku program ini sudah bagus, dan juga sangat bermanfaat apalagi orang sangat butuh bantuan di masa pandemi seperti sekarang. Jadi menurut ku sudah sangat bermanfaat mi.” (hasil wawancara dengan NS pada tanggal 1 Juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa program BST ini sudah bagus dan dengan diadakannya program tersebut maka dapat bermanfaat bagi penerima apalagi dimasa pandemi seperti sekarang hampir semua masyarakat membutuhkan bantuan tersebut.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Penerima BST tentang Responsivitas BST.

"sejauhmana tingkat keberhasilan Program BST ini dalam memuaskan kebutuhan masarakat? Menurut saya program ini cukup bagus karena seperti ini sudah dapat menambah kebutuhan misalnya bisa beli beras, gula, minyak dan sembako lainnya, karena ini berbentuk uang jadi kebutuhan apa yang kurang saya bisa penuh" (hasil wawancara dengan HW pada tanggal 8 Juli 2021)

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam memuaskan kebutuhan masarakat program BST ini sudah dapat membantu menambah kebutuhannya, misalnya dalam pemenuhan bahan pokok, masarakat penerima dapat memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan biaya dan manfaat dari BST.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Penerima BST tentang Responsivitas BST.

"sejauhmana tingkat keberhasilan program BST ini dalam memuaskan kebutuhan masarakat? Saya rasa kalau bantuan berupa tunai sudah bisa dikatakan dapat memenuhi kebutuhan karena dengan uang tunai masarakat dapat bebas membelanjakan uang kebutuhan tersebut sesuai dengan kebutuhan. Akan tetapi seperti yang saya katakan, dengan jumlah tersebut tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan kami apalagi di masa pandemi Covid-19." (hasil wawancara dengan SM pada tanggal 13 Juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan dari suatu BST menurut narasumber sudah cukup memuaskan, dengan bantuan berupa uang tunai tersebut dalam memenuhi kebutuhan,

masyarakat bebas untuk menggunakan bantuan berupa uang tersebut sesuai kebutuhan masyarakat.

Akan tetapi, seperti yang dikatakan narasumber lain bahwa dengan biaya atau jumlah tersebut masih belum bisa memenuhi seluruh perekonomian masyarakat, apalagi ditambah dengan kasus Covid-19 makin mempersulit masyarakat miskin mencari nafkah.

5. Ketepatan

Ketepatan atau kelayakan adalah kriteria yang digunakan untuk menyeleksi sejumlah pilihan untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas.

Untuk melihat tingkat ketepatan kebijakan BST di Kelurahan Kaluku Bodoa, penulis bertanya mengenai sasaran dari kebijakan BST ini dan manfaat dari hasil kebijakan tersebut.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Kepala Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar tentang ketepatan BST.

"apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai? Untuk sasaran kebijakan ini yaitu masyarakat yang berhak dan sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan. mengenai ketepatan kebijakan tersebut, tentu saja sudah berguna dan bernilai di Kelurahan Kaluku Bodoa ini, karena setidaknya dapat membantu meringankan sejumlah beban kebutuhan. Apalagi tidak adanya keluhan dari masyarakat tentang penerimaan ini." (hasil wawancara dengan MAN pada tanggal 30 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa hasil tujuan yang diinginkan sudah berguna dan bernilai bagi para penerima BST. Adapun ketepatan kebijakannya, tentu saja sudah sangat membantu para penerima bantuan

apalagi dengan kondisi di pandemi seperti sekarang, setidaknya dapat membantu meringankan sejumlah beban.

Hal tersebut senada dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Kaluku Bodoa yang menyatakan bahwa:

"apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bermilai? iya, insyaAllah berguna dan bermilai bagi penerimaanya, karena seperti di masa pandemi Covid-19, masyarakat sangat membutuhkan bantuan untuk dapat memenuhi kebutuhannya." (hasil wawancara dengan AM pada tanggal 30 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa hasil dari tujuan yang diinginkan suda benar-benar berguna dan bermilai bagi penerima BST.

Dimana seperti di masa pandemi Covid-19, masyarakat banyak sekali yang membutuhkan bantuan tersebut, dengan adanya bantuan BST dapat membantu dan menutupi kebutuhan yang menjadi masalah di dalam masyarakat.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan salah satu Tokoh masyarakat di Kelurahan Kaluku Bodoa mengenai Ketepatan BST.

"sudah tepakat pelaksanaan BST dalam memilih penerima? Kalau ketepatan saya rasa sudah tepat ini, karena kalau kita mau lihat di masyarakat ini serba kekurangan apalagi di masa pandemi Covid-19 tapi dengan adanya bantuan ini sudah dapat menutupi kebutuhannya." (hasil wawancara dengan K pada tanggal 8 Juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ketepatan dari program BST ini sudah tepat, karena mengingat masa pandemi banyak masyarakat yang serba kekurangan. Akan tetapi, dengan adanya bantuan BST ini sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat walaupun tidak semuanya dapat terpenuhi.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Penerima BST tentang Ketepatan BST.

“apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bermilai? Menurut saya kegiatan ini sudah cukup tepat karena dengan bantuan tersebut sudah bermanfaat bagi kami para penerima dalam membantu sedikit dalam pemenuhan kebutuhan.” (hasil wawancara dengan R pada tanggal 28 Juni 2021)

Berdasarkan dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang mendapat bantuan BST sangat merasa cukup tepat, dengan adanya kegiatan ini penerima merasa terbantu dalam pemenuhan kebutuhannya.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Penerima BST tentang ketepatan BST.

“sudah tepatkah pelaksanaan BST dalam memilih penerima? Menurut saya sudah tepat, karena salah satunya saya sudah lansia dan penerimaannya lumayan sudah baik, apalagi pas penerimaannya sudah bisa di wakili asalkan yang mewakili ada namanya dalam K.R.” (hasil wawancara dengan H pada tanggal 1 Juli 2021)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ketepatan BST ini sudah cukup tepat karena penerimaannya adalah salah satunya adalah seorang lansia yang sudah tidak memiliki mata pencabutan apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Penerima BST tentang ketepatan BST.

“sudah tepatkah pelaksanaan Program kegiatan BST dalam memilih penerima bantuan tersebut? Menurut saya sudah tepat, karena sudah masuk salah satu penerima bantuan. Apalagi dimasa pandemi semua orang butuh bantuan seperti ini.” (hasil wawancara dengan NS pada tanggal 1 Juli 2021)

BST sudah dapat tercapai di penerima. Di masa pandemi seperti sekarang ini, prgram BST ini sudah sangat tepat untuk bagi penerima.

Berikut kutipan wawancara penulis dengan Penerima BST tentang ketepatan BST.

Adapun data yang diperoleh peneliti dari hasil penelitian dalam penelitian Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 di Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar. Pada penelitian ini kalimat deskriptif lebih dominan yang merupakan hasil wawancara yang ditulis dan direkam menggunakan handphone (perekam suara).

C. Pembahasan Hasil Penelitian

berdampak Covid-19.

saja program BST ini sudah meringankan sedikit beban kebutuhan keluarga yang tersebut belum mampu memecahkan masalah perekonomian masyarakat, hanya bantuan tersebut sudah bernilai atau berguna bagi masyarakat. Namun, program Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa program (hasil wawancara dengan SM pada tanggal 13 Juli 2021)

bertanggung jawab sudah bisa menutupi sebagian kebutuhan kami." semuanya serba susah. Dan dengan adanya Program bantuan ini kami permasalahan perekonomian di masa pandemi yang bisa dilihat sekarang memecahkan masalah bisa dikatakan belum, akan tetapi meringankan bagi masyarakat? Seperti yang sudah saya katakan tadi, kalau soal "apakah hasil yang diharapkan sudah benar-benar berguna atau bernilai ketepatan BST.

Berikut kuisipan wawancara penulis dengan Penerima BST tentang membantu meringankan beban kebutuhan masyarakat.

mendapatkan penghasilan yang cukup dan susah mencari pekerjaan dapat ketepatan program BST ini sudah tepat, disamping masyarakat yang susah Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tentang (tanggal 8 Juli 2021)

meringankan beban kebutuhan." (hasil wawancara dengan HW pada susah mencari pekerjaan dan dengan adanya bantuan ini dapat sedikit menjawab kebutuhan ibu? Iya sudah tepat mi, karena di masa pandemi ini bagaimana tanggapan ibu tentang ketepatan BST ini, apakah sudah bisa

Selain hasil wawancara, peneliti juga menerima dokumen dari kantor Kelurahan

Kaluku Bodoa.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sehingga dalam proses

pengumpulan data, peneliti juga menggunakan proses teknik analisis data yang

terdiri dari tiga yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Pertama, reduksi data. Pada tahap ini peneliti akan mengumpulkan data

yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan menggunakan teknik

wawancara. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok,

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya.

Kedua, penyajian data. Pada tahap ini peneliti akan mengumpulkan data

yang penyajiannya bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan

antar kelompok dan sejenisnya.

Ketiga, verifikasi data. Pada tahap ini peneliti menggunakan langkah

terakhir dalam teknik analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu penarikan

kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang sebelumnya

belum pernah ada.

1. Efektivitas

Indikator Efektivitas ini berhubungan dengan apakah suatu substitusi

mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya

tindakan. Efektivitas yang secara dekat berkenaan dengan rasionalitas teknis,

selalu dikur dari bagian produk, layanan, atau nilai moneterinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa dalam hal ini

Program Bantuan Sosial Tuna (BST) di Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan

Tallo Kota Makassar sudah cukup efektif. Program bantuan tersebut sudah dilaksanakan di Kelurahan tersebut dengan jumlah penerima 346 KK yang terdaftar sebagai penerima bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, dalam hal ini efektivitas BST sudah cukup untuk meringankan beban perekonomian masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini. Masyarakat yang menerima bantuan tersebut menyatakan bahwa bantuan tersebut belum bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat di Kelurahan Kaluku Bodoa, bantuan ini hanya mampu meringankan sedikit beban kebutuhan masyarakat.

Dalam hal ini, dari hasil wawancara peneliti dengan informan bahwa program BST ini masih dikatakan belum cukup efektif karena belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat menengah kebawah. Akan tetapi, setidaknya bantuan tersebut masih bisa menutupi kebutuhan masyarakat di Kelurahan Kaluku Bodoa ini. Dari hasil wawancara juga dikatakan bahwa penerima bantuan merasa kurang puas, karena sebagian masyarakatnya masih ada yang berhak mendapatkan bantuan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa program BST ini sudah cukup baik dan efektif dalam mencapai tujuannya untuk meringankan beban pengeluaran keluarga miskin. Namun, menurut penulis bahwa kebijakan Program BST ini masih belum cukup efektif, hal tersebut dikarenakan ditemukan masih adanya masyarakat yang berhak mendapatkan program ini akan tetapi tidak mendapatkan manfaat dari program tersebut. Ditemukan juga adanya

masyarakat yang menerima bantuan lain selain BST, yang seharusnya setiap

keluarga hanya bisa mendapatkan satu program bantuan saja.

Hal tersebut juga didukung oleh beberapa informan di atas bahwa dalam

pemilihan BST ini perlu pembahasan data agar pada pelaksanaan Bantuan Sosial

Tunai selanjutnya sudah tetap sasaran bagi masyarakat miskin di Kelurahan

Kaluku Bodoa tersebut.

2. Kecukupan

Indikator Kecukupan ini berhubungan dengan seberapa maksimal suatu

tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, kesempatan atau nilai yang

menimbulkan adanya masalah. Tolak ukur kecukupan menekankan pada

efektivitas hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan informan

bahwa kecukupan Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Kaluku Bodoa dalam hal ini

sudah dapat meredakan beban kebutuhan masyarakat miskin di masa pandemi.

Dari hasil penelitian ini, Program BST sudah dapat membantu meredakan

sebagian beban perekonomian masyarakat miskin. Dalam hal ini, masyarakat

merasa dengan adanya bantuan ini, setidaknya dapat membantu kebutuhan

di masa pandemi Covid. Pencapaian yang diharapkan dapat sedikit membantu

kebutuhan masyarakat miskin, dengan alternatif tersebut masyarakat merasa

cukup untuk menutupi kebutuhan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Kelurahan Kaluku Bodoa dalam

mengatasi permasalahan umum yang sedang dihadapi masyarakat memang sudah

tepat, karena masyarakat ini sendiri merasa senang dan bersyukur, hal ini penulis

telah mengamati melalui kondisi lingkungan dan sosial yang mayoritasnya adalah masyarakat menengah kebawah yang telah terdaftar dalam keluarga penerima bantuan atau manfaat. Dalam hal ini, penulis juga melihat bahwa bantuan dalam bentuk tunai yang disalurkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang menerima sudah cukup baik dan sudah tepat penggunaannya.

3. Pemerataan

Indikator ini erat berkaitan dengan rasionalitas legal dan sosial dan mengarah pada distribusi akibat dan usaha di sela-sela kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang berdampak (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil disalurkan. Kebijakan yang dibuat untuk mensalurkan pendapatan, kesempatan pendidikan atau pelayanan publik sewaktu-waktu direkomendasikan atas dasar tolak ukur kesamaan. Tolak ukur kesamaan sangat berkaitan dengan konsep yang saling berelasi, yaitu keadilan atau kebiasaan dan terdapat konflik etis sekitar dasar yang mencoba untuk mendistribusikan risorsis dalam masyarakat.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa pemerataan yang terjadi di Kelurahan Kaluku Bodoa sudah adil dan didistribusikan secara merata. Dalam hal ini, setiap masyarakat penerima mendapatkan jumlah dan biaya yang merata. Didukung sebagaimana halnya, kementerian sosial sendiri telah mengeluarkan bantuan ini dengan jumlah yang sama besar kepada setiap penerima bantuan.

Adapun hasil dari observasi peneliti, senada dengan hasil wawancara,

dimana program BST sudah merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Jadi berdasarkan hasil peneliti melalui wawancara, observasi,

dan dokumentasi dari peneliti di atas, maka sudah dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan Bantuan Sosial Tunai sudah cukup merata dan juga

tidak adanya perbedaan biaya dan manfaat yang didistribusikan kepada masyarakat penerima tersebut.

4. Responsivitas

Indikator ini berhubungan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat

memuaskan preferensi, kebutuhan, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Tolak ukur responsivitas yaitu penting karena analisis yang dapat

memuaskan semua tolak ukur lainnya, efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal apabila belum menanggapi kebutuhan nyata dari kelompok yang

seharusnya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di Kelurahan Kaluku Bodoa bahwa tingkat memuaskan preferensi, kebutuhan, atau nilai kelompok-kelompok

masyarakat tertentu sudah mendapatkan respon yang cukup baik bagi para penerima bantuan di Kelurahan Kaluku Bodoa. Dalam hal ini, dari hasil penelitian

mengungkapkan bahwa bantuan ini sudah cukup meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, dapat dilihat pula belum adanya keluhan dari

masyarakat tentang program BST ini.

Adapun hasil observasi dari peneliti, program bantuan ini memang sudah

cukup baik karena masyarakat penerima merasa terbantu dengan adanya bantuan

ini. Walaupun dalam hal ini, tidak sepenuhnya membantu seluruh kebutuhan

masyarakat, akan tetapi dapat meringankan beban masyarakat penerima di

kelurahan kaluku bodea tersebut.

Jadi dapat disimpulkan mengenai responsivitas dari Program BST ini

melalui wawancara, observasi dan dokumentasi bahwa program BST sudah

mendapatkan respon yang cukup baik dari masyarakat dan program ini telah

mendapatkan hasil yang sangat bermanfaat bagi masyarakat penerima karena

membantu mereka dalam meringankan kebutuhan pokoknya. Begitu pula, dengan

adanya respon yang baik dari masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa program

tersebut sudah berhasil dalam mencapai tujuannya.

5. Kecepatan

Indikator kecepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas

substantive, karena pertanyaan tentang kecepatan kebijakan tidak berhubungan

dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersamaan.

Kecepatan mengarah pada nilai atau harga dari tujuan-tujuan program dan kepada

kuatnya anggapan yang melandasi tujuan tersebut.

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa narasumber bahwa tingkat

kecepatan program BST dikelurahan kaluku bodea ini sudah dapat memenuhi

syarat karena sudah sesuai dengan ketentuan dari persyaratan tersebut. Apalagi

terkhusus di wilayah kelurahan kaluku bodea, yang dimana sebagai

masyarakatnya menengah kebawah.

Dari hasil observasi tentang ketepatan program BST ini bagi penerima

sudah berguna dan bernilai dengan baik di kelurahan tersebut. Masyarakat

merasa dengan adanya program bantuan ini sudah cukup meringankan beban perekonomian yang disebarkan oleh pandemi covid-19. Dengan uang tunai ini masyarakat sangat terbantu karena dapat memanfaatkan untuk membeli bahan pokok yang diperlukan sesuai kebutuhan masyarakat.

Jadi dapat dilihat dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi bahwa penyaluran Program BST di Kelurahan Kaluku Bodoa ini adalah sudah berguna dan bernilai bagi masyarakat tersebut, karena dapat dilihat dari masyarakatnya yang sebagian besar memiliki kehidupan menengah kebawah atau miskin.

Hasil Penelitian
Tabel.4.3

No	Indikator Evaluasi Kebijakan	Hasil
1	Efektivitas	Berkaitan dengan apakah suatu alternatif tersebut mendapatkan hasil yang diharapkan para penerima BST atau mencapai tujuan dari diadakannya Program Kebijakan tersebut.
2	Kecukupan	Berkaitan dengan seberapa jauh tingkat kesuksesan dalam memuaskan kebutuhan, atau nilai yang menimbulkan adanya masalah.
3	Pemerataan	Berkaitan dengan apakah Program Kebijakan BST sudah terjadi pemerataan bagi masyarakat penerima BST tersebut.
		Tercapai
		Belum Tercapai

4	Responsivitas	Berkaitan dengan apakah seberapa jauh Program Kebijakan BST dapat memuaskan kebutuhan, referensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan.	Tercapai
5	Ketepatan	Berkaitan dengan suatu pernyataan dimana ketepatan suatu kebijakan terhadap pemecahan masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.	Tercapai

PENUTUP

BAB V

A. Kesimpulan

1. Indikator Efektivitas: Kebijakan BST di Kelurahan Kaluku Bodoa belum efektif, meskipun pencapaian tujuannya dari diadakannya tindakan telah terlaksana, dalam pemilihan penerima tidak valid karena ditemukan masih adanya masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan tersebut tetapi tidak terdaftar sebagai penerima.
2. Indikator Kecukupan: Kebijakan program Bantuan Sosial Tunai di Kelurahan Kaluku Bodoa dalam mengatasi perekonomian masyarakat sudah dapat membantu beban di masa pandemi covid-19, namun belum menyelesaikan persoalan relatif kesejahteraannya.
3. Indikator Pemerataan: Perhubungan dengan biaya dan manfaat BST yang didistribusikan kepada masyarakat di Kelurahan Kaluku Bodoa sudah merata. Adapun besaran biaya dan manfaatnya yang telah didistribusikan itu sudah merata untuk semua bagi masyarakat di Kelurahan Kaluku Bodoa, masyarakat cuma perlu memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan.
4. Indikator Responsivitas: Respon dari masyarakat yang ada di Kelurahan Kaluku Bodoa sudah sangat baik, dengan adanya respon yang baik dan rasa syukur dari masyarakat penerima, program BST ini sudah dikatakan berhasil.
5. Indikator Ketepatan: Dalam hal ketepatan bantuannya sudah tepat, karena dengan bantuan tersebut sudah membantu meringankan beban kebutuhan

pokok di masa pandemi Covid-19 bagi masyarakat di Kelurahan Kaluku

Bodoa.

B. Saran

1. Hendaknya Kementerian Sosial melakukan pendataan ulang di lapangan kepada masyarakat penerima sehingga bantuan BST tersebut sampai kepada masyarakat yang lebih berhak.
2. Harusnya pemerintah memberi perhatian khusus kepada penerima yang mendapatkan BST dan juga Bantuan lain yang seharusnya tidak lebih dari satu bantuan.
3. Untuk kedepannya Kementerian Sosial agar menambah jumlah penerima BST, karena masih banyak ditemukan masyarakat menengah kebawah di Kelurahan Kaluku Bodoa tetapi tidak terdaftar sebagai penerima BST dan agar tidak menimbulkan masalah baru pula.
4. Bantuan sosial tunai untuk lebih diingkatkan lagi, terkhusus pada biaya dan manfaat agar dapat mengatasi kebutuhan perekonomian masyarakat yang berdampak di masa Pandemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2013). *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Amatya Sen. (2000). *Demokrasi bisa memberantas kemiskinan*. Penerbit Mizan.
- Carly. (2020). *Miskin Terkena Dampak Covid-19 di Desa Talatad Kecamatan Sulum*. 1-16.
- Dewi, M. S. (2011). *Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Kramatwatu*. 122.
- Dunn. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Gadjah Mada University Press.
- Fahrudin, A. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. PT. Tiara Wacana.
- Indarwati (1961). *Peranan Pekerja Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LANSLA) di Unit Rehabilitas Sosial Purbo Yuwono Brebes*.
- Jones, H. (1990). *Social Welfare in Third World Development*. MacMillan.
- Kartasasmita. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. PT. Pustaka Cidesindi.
- Khoiriyah. (2020). *Efektifitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gondongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Boyonegoro The Effectiveness Of The Implementation Of Social Assistance On Communities Affected By Covid-19 In The*. 15, 97-110.
- Lindblom, C. (1986). *Proses Penetapan Kebijakan Publik* (edisi kedua). Airlangga.
- Middleley, J. (2005). *Pengembangan Sosial, Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial*. Diktorat Perguruan Tinggi Agama Islam Depag RI.
- Milligan. (2006). *Family Wellbeing Indicators from 1981-2001*. University of Auckland and Statistic New Zealand.
- Nirwanasari. (2020). *Implementasi Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya di Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa*.
- Pramanik, N. D. (2020). *Dampak bantuan paket sembako dan bantuan langsung tunai terhadap kelangsungan hidup masyarakat padalarang pada masa*

pandemi covid 19, 01(12), 113–120.

Rohman, R. H. I. N. (2019). *Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Lokal di Pasar Kuna Lereng Desa Petir Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas*.

Sedarmayanti. (2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Penerbit Bandar Maju.

Strauss. (2004). *Indonesian Living Standards: Before and After the Financial Crisis*. RAND Corporation, Santa Monica, USA, and, Institute of South-east-Asian Studies.

Syakir, A. (2017). *Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Desa Pandangan Wetan, Kecamatan Krungan, Kabupaten Rembang Jawa Tengah*. Ceka.

Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik (teori dan proses)*. Media Pressindo.





LAMPIRAN



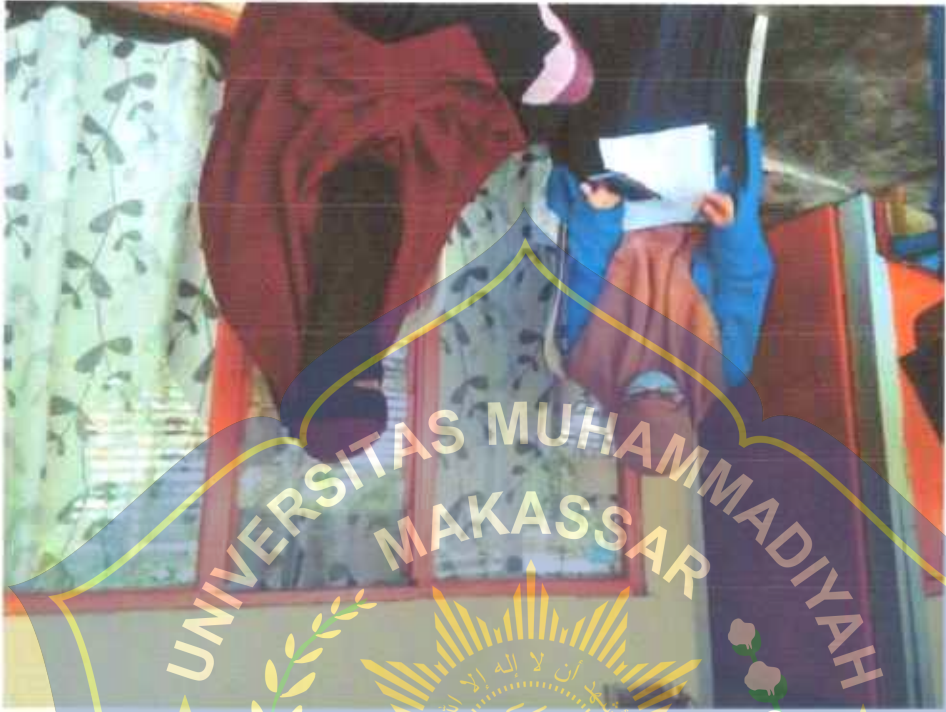
(Dokumentasi: Proses wawancara dengan Sekertasi Kelurahan Kaluku Bodoa.
Ibu Andi Muthmainnah)



(Dokumentasi: Proses wawancara dengan Kepala Kelurahan Kaluku Bodoa.
Bapak Muh Amir Nur, SH., M.Si)



(Dokumentasi: Proses wawancara dengan Penerima Bantuan Sosial Tunai. Ibu Rahmawati)



(Dokumentasi: Proses wawancara dengan salah satu Tokoh Masyarakat. Bapak Kamaruddin)



Informan:

1. Kepala Kelurahan

2. Sekretaris kelurahan

3. Tokoh masyarakat kelurahan

4. Penerima BST (5 orang)

- Dalam pelaksanaan kebijakan Bantuan Sosial Tunai, apakah hasil yang diinginkan Ibu/Bapak sudah tercapai?
- Setelah mendapatkan BST tersebut sudah dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi Ibu/Bapak?
- Seberapa jauh hasil yang telah tercapai dalam memecahkan masalah?
- Apakah BST ini dapat memuaskan kebutuhan Ibu/Bapak dalam hal memenuhi kebutuhan di masa Pandemi Covid-19?
- Bagaimana pendapat Ibu/Bapak tentang Program Kebijakan BST ini, apakah sudah merata dan sudah didistribusikan secara adil?
- Apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata pada kelompok masyarakat yang berbeda?
- Sejauhmana tingkat keberhasilan Program Kebijakan BST ini dalam memuaskan kebutuhan masyarakat?
- Sudah tepatkah pelaksanaan Program Kebijakan BST dalam memilih penerima Bantuan tersebut?
- Jika sudah terlaksanana, apakah penerima BST sudah tetap sasaran?

(Dokumentasi: Proses wawancara dengan Penerima Bantuan Sosial Tunai. Ibu Hasmawati)



(Dokumentasi: Proses wawancara dengan Penerima Bantuan Sosial Tunai.
Ibu Hane)



(Dokumentasi surat untuk Penerima Bantuan Sosial Tunai)



